LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
(LKj-IP SKPD)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya pada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKj-IP SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKj-IP SKPD BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing governance*) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas bantuan dan kerja samanya dalam penyusunan LKj-IP SKPD BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini, dan semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Demikian untuk menjadikan maklum dan kami mohon saran dan masukan untuk kesempurnaan penyusunan laporan kedepan.

Praya, Januari 2025

Kepala BAPPERIDA
Kabupaten Lombok Tengah

H. LALU WIRANATA, S.IP, MA
NIP. 197611282005011006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....2
DAFTAR ISI....3
RINGKASAN EKSKUTIF....4
BAB I PENDAHULUAN....6
I.1. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah....6
I.2. Data....7
I.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah....10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA....13
II.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah....13
II.2. Rencana Kerja Tahunan....21
II.3. Indikator Kinerja Utama....23
II.4. Perjanjian Knierja Perangkat Daerah Tahun 2024....24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA....30
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah....30
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah....31
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah....32
III.4. Akuntabilitas Keuangan....72
BAB IV PENUTUP....77
LAMPIRAN

RINGKASAN EKSKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah memiliki tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan daerah di bidang perecanaan pembangunan dan bidang riset dan inovasi daerah.

BAPPERIDA sebagai lembaga teknis perencanaan daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders). Oleh karenanya langkah strategis perlu segera diwujudkan dan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan operasional yang nyata, produktif, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi yang berkembang.

Berangkat dari berbagai tuntutan publik sebagaimana tersebut di atas, BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah diharapkan untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerja Bapperida Kabupaten Lombok Tengah diperlukan adanya Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah guna lebih mengetahui kemampuan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-PAN&RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja yang terdiri dari berbagai indikator, mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja yang menyeluruh dan terpadu untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi serta misi organisasi, sekaligus merupakan alat komunikasi

pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dipergunakan sebagai umpan balik (*feed back*) untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait.

BAPPERIDA yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan dan di bidang Riset Inovasi Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya mempunyai kewajiban menjalankan dan menjadi motor penggerak terhadap visi Kabupaten Lombok Tengah sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selanjutnya disingkat BAPPERIDA, memiliki tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan daerah di bidang perecanaan pembangunan dan bidang riset dan inovasi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPPERIDA mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan bidang tugasnya;
d. Pengkoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

I.2. Data

Berdasarkan data kepegawaian BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024, kondisi pegawai dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

No	Jenis Kelamin	A S N			NON ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN (%)	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN (%)	Persentase Terhadap Seluruh
	Laki-Laki	26	55	46	8	80	14
	Perempuan	21	45	37	2	20	3
	Jumlah	**47**	**100**	**83**	**10**	**100**	**17**
Jumlah Seluruh Pegawai (ASn dan Non ASN)		**57**					

Kondisi data kepegawaian BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	A S N			NON ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN (%)	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN (%)	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai (%)
	S2	13	28	23	-		
	S1	27	57	47	3	30	5
	D3	-	-	-	1	10	2
	SMA / SMK / MA	7	12	12	5	50	9
	SD/SMP	-	-	-	1	10	2
	Jumlah	**47**	**100**	**82**	**10**	**100**	**18**
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		**57**					

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsi dijabarkan sebagai berikut:

Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan
Alat Alat Angkutan	Kendaraan Roda 4	9 Unit	1 Unit Rusak Berat
	Kendaraan Roda 2	59 Unit	22 Unit Mutasi + Lelang
			16 Unit Kondisi Baik
			21 Unit Rusak Berat
Alat Studio dan Alat Komunikasi		20 Unit	Kondisi Baik
Bangunan Gedung	Pembangunan Sarana Pasar Pancor Dao (Ekonomi)	1 Unit	
Asset Lainnya	Baliho	4 Unit	Kondisi Baik

Perencanaan pembangunan daerah ke depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut, BAPPERIDA harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul:

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
3. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;

4. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPERIDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: RTRW, RDTR, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Beberapa permasalahan pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam inovasi daerah;
2. Keterlambatan Perangkat Daerah atau stakeholders terkait atas penyampaian data perencanaan.

I.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

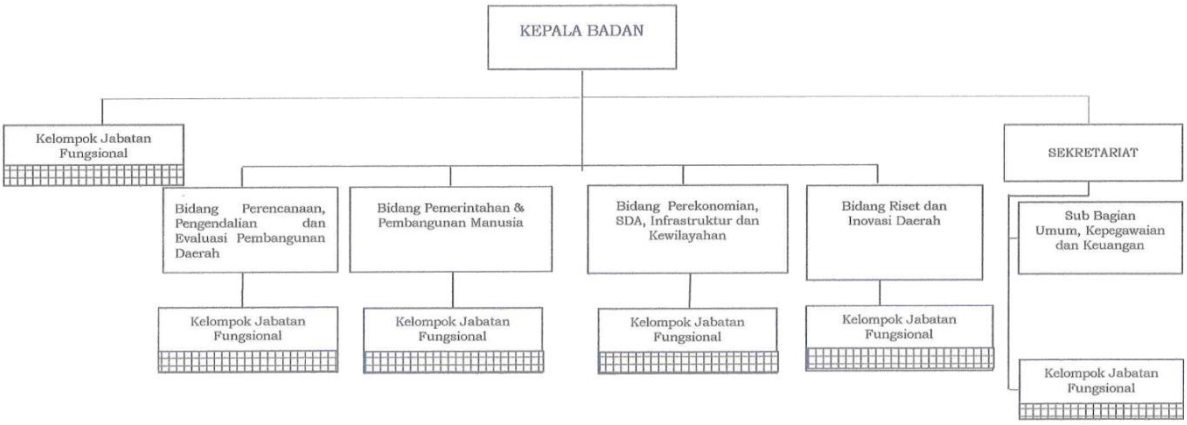
Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah, struktur organisasi BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari:

1. **Kepala Badan**, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang riset dan inovasi daerah.
2. **Sekretaris Badan**, dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
    a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, perlengkapan dan penatakelolaan keuangan.
3. **Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
4. **Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi urusan pemerintahan

bidang pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat desa, tenaga kerja dan transmigrasi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan sumber daya manusia, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat Daerah dan unsur kewilayahan.

5. **Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan reneana, pengkoordinasian,pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika,persandian, dan statistik.
6. **Kepala Bidang Bidang Riset dan Inovasi Daerah** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyaitugas melaksanakan kebijakan, koordinasi,sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah, dan melaksanakan penyusunan .rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
7. **Jabatan Fungsional**, Pada lingkup Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan

pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra BAPPERIDA harus sejalan dengan pencapaian Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)",

Makna dari Visi tersebut adalah:

1. Beriman merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
2. Sejahtera menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
3. Bermutu merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
4. Maju memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;

5. Berbudaya dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (*The Heart of Lombok*).

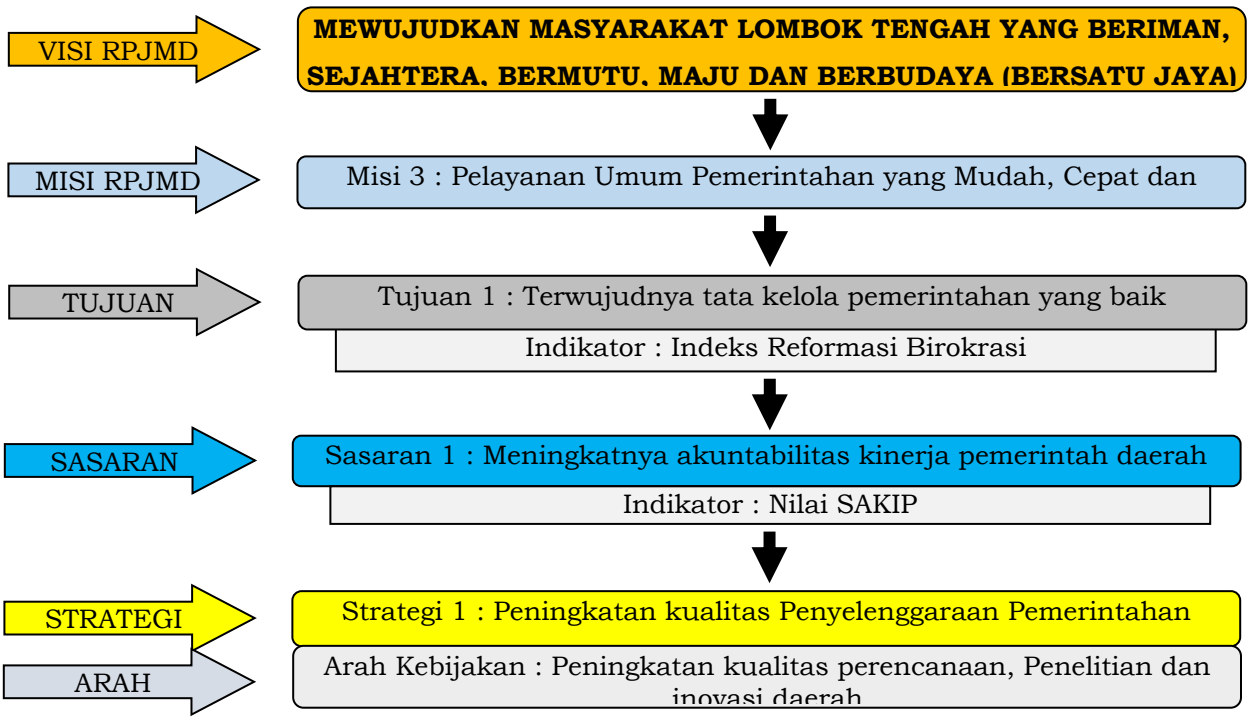
Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat; Bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba.
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul; Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumber daya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumber daya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat digambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri.
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih; Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan public ke masyarakat yang efektif dan efesien.
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas; Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan den gan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah.

5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur; Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang diturunkan kedalam Renstra BAPEPRIDA Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan tujuan utama yaitu mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

Peran BAPPERIDA dalam Mendukung Pencapaian
Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2021-2026



Berdasarkan hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026; isu-isu strategis BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah; serta tugas dan fungsi BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah; dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada RENSTRA Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, yaitu:

"MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH"

Indikator dari tercapai atau tidaknya tujuan tersebut dapat terlihat dari ketercapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Berkaitan hal tersebut maka ditetapkan 3 (tiga) indikator tujuan dari BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

1. Indeks Inovasi Daerah;
2. Persentase Ketercapaian IKU Kabupaten > 90%;
3. Persentase perencanaan OPD Baik.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Dimana untuk pencapaian tujuan Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, yaitu dengan mempertimbangan tugas fungsi BAPPERIDA serta aturan-aturan terkait perencanaan, maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya Efektivitas Evaluasi dan Pengendalian;
2. Meningkatnya Keselarasan dan sinergi Perencanaan Daerah;
3. Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas;

Berikut tabel tujuan, sasaran dan target kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Matriks Tujuan, Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Sangat Inovatif Predikat	Sangat Inovatif Predikat
		Persentase Ketercapaian IKU Kabupaten > 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perencanaan OPD Baik	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Efektivitas Evaluasi dan Pengendalian	Persentasae OPD Dengan Rata-Rata Capaian Kinerja Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Keselarasan dan sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Prioritas Daerah Dengan Sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan RKPD Dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Nilai Inovasi Daerah Dengan Kategori Sangat Inovatif	37.77 Poin	41 Poin	45 Poin	49 Poin	53 Poin	56 Poin

Selanjutnya perlu disusun strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai

tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Dalam Renstra BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, strategi dan arah kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPERIDA, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Lombok Tengah. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian tujuan yang akan dicapai pada Renstra Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 yaitu "**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**", rumusan strategi dan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan koordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang didukung pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah dan program pengembangan data dan informasi.
2. Pengoptimalan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pencapaian target kinerja pembangunan.
3. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :
    - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam

lingkup perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam). Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sda (sumber daya alam).
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- Pengoptimalan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu mewujudkan penelitian dan pengembangan yang aplikatif bagi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya, serta fisik prasarana dan lingkungan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, dan program

penelitian dan pengembangan daerah dengan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran bapperida kabupaten lombok tengah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

VISI	**MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"**		
MISI 3	Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih; Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan public ke masyarakat yang efektif dan efesien		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Efektivitas Evaluasi Dan Pengendalian	Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Kegiatan	Peningkatan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Serta System Pengawasan Sebagai Umpan Balik Bagi Perencanaan
	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Sinkronisasi Dan Sinergitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Ketersediaan Data Dan Informasi Yang Akurat, Relevan Dan Terkini Dengan Membangun Koneksi Data Perangkat Daerah Untuk Mendukungan Proses Perencanaan Pembangunan
			Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinergi, Sinkronisasi

	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Menetapkan Regulasi Untuk Pemanfaatan Kajian Yang Dibuat	Mengembangkan Penelitian Dan Pengembangan Berdasarkan Permasalahan Pembangunan

Hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas tetap dipedomani dalam penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Selanjutnya dilakukan penyusunan rencana program dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran maupun untuk pemenuhan layanan Bapperida dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Rencana program dilengkapi outcome program beserta target capaiannya, demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi output kegiatan beserta target capaiannya.

II.2. Rencana Kerja Tahunan

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan beserta indikatornya memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja, dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan beserta indikatornya juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah, dalam hal ini disesuaikan dengan susunan organisasi Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Pada Renstra Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan jangka menengah yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah”, serta dengan sasaran yaitu Meningkatnya Efektivitas Evaluasi Dan Pengendalian,

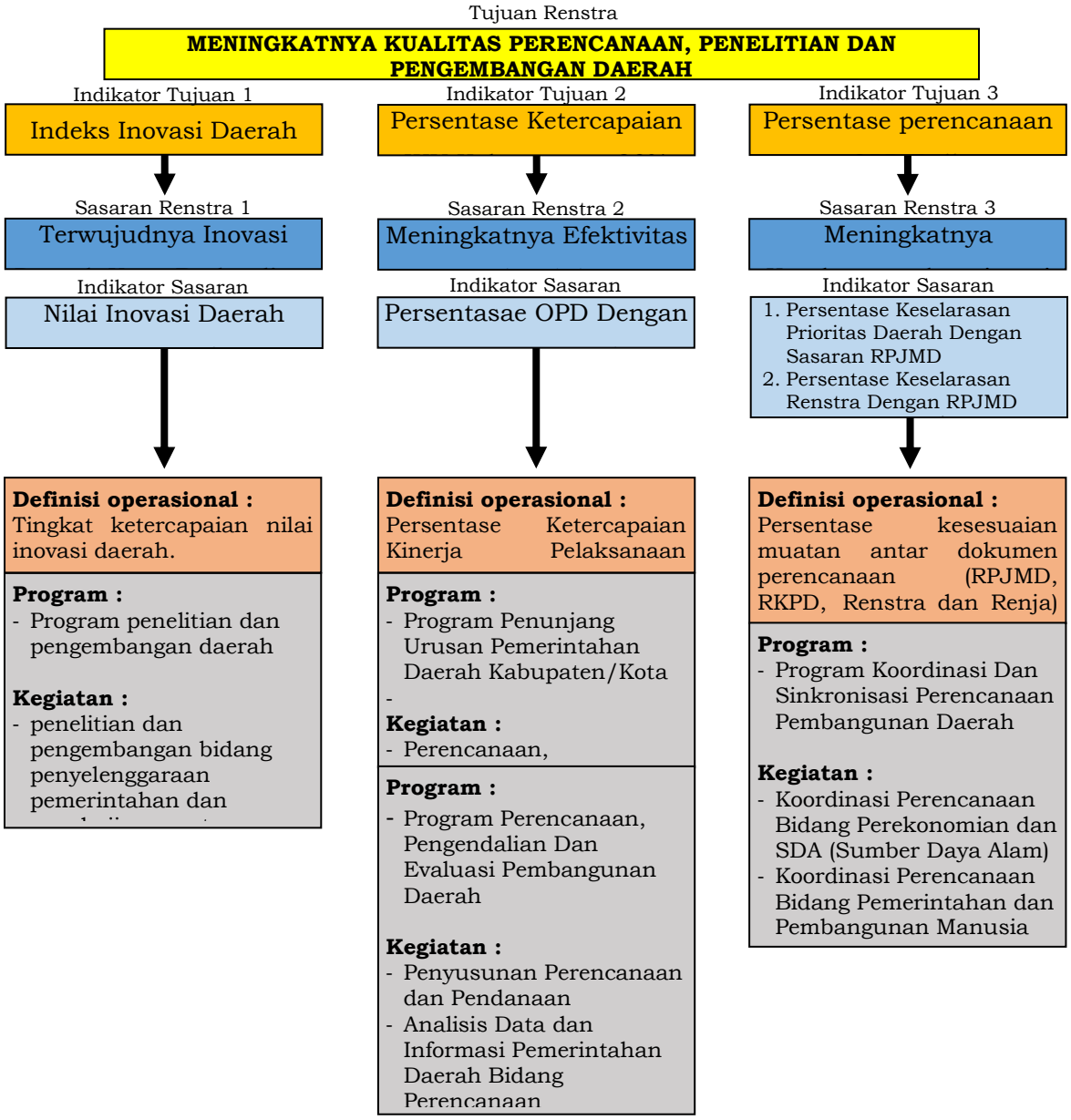
Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah Dan Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan program-program utama yang menjadi *core business* BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kerangka alur pikir dalam penentuan indikator outcome dari masing-masing program utama dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran tersaji pada gambar sebagai berikut.

Kerangka Alur Pikir Penentuan Indikator Outcome Program Utama
Pada Renstra Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026



II.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU, merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan IKU BAPPERIDA Tahun 2021-2026 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

No.	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir 2026
A	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat
B	Persentase Ketercapaian IKU Kabupaten > 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C	Persentase perencanaan OPD Baik	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%

II.4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Pada tahun 2024 BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah, serta dari Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah kepada pimpinan yang lebih rendah secara berjenjang untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja Sasaran Strategis yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan serta mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.

Adapun indikator kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 pada tataran Eselon II (Kepala Bapperida) adalah sebagai berikut :

Matriks Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 (Perjanjian Kinerja Eselon II)

Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024
Meningkatnya Efektivitas Evaluasi dan Pengendalian	Persentasae OPD Dengan Rata-Rata Capaian Kinerja Tinggi	100%
Meningkatnya Keselarasan dan sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Prioritas Daerah Dengan Sasaran RPJMD	100%
	Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	100%
	Persentase Keselarasan RKPD Dengan RPJMD	100%
Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Nilai Inovasi Daerah Dengan Kategori Sangat Inovatif	45 Poin

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian ditetapkan Perjanjian Kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 pada tataran Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang pada BAPPERIDA) serta Eselon IV (Kepala Sub Bagian pada BAPPERIDA) sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Keselarasan Kinerja Program Prioritas OPD dengan Prioritas Daerah**	**100%**
	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	**100%**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 %
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok
- Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara
- Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Dokumen

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD**	**100%**
	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	**100%**
	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	**100%**
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Ekonomi	**100%**
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur	**100%**
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang SP2M	**100%**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Perekonomian dan SDA	8 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	**100 %**
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	**21 %**
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknolog	1 Dokumen
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen
- Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyaraka	1 Dokumen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP OPD**	**B Predikat**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaporan	100%
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100%
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang / bulan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Notulen Rapat	12 Laporan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang penunjang pemerintah daerah	100%
- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah kondis baik	90%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran evaluasi kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan serta akuntabilitas organisasi, dengan melakukan klarifikasi terhadap capaian target untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).

Adapun capaian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

Hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target}} \times 100\ \%$$

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Target} - (\textbf{Realisasi} - \textbf{Target})}{\textbf{Target}} \times 100\ \%$$

Capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian dikelompokkan dalam skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1) 90 < x = Sangat Tinggi
2) 75 < x ≤ 90 = Tinggi
3) 65 < x ≤ 75 = Sedang
4) 50 < x ≤ 65 = Rendah
5) X ≤ 50 = Sangat Rendah

III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 didapatkan melalui pengukuran terhadap Perubahan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Rencana Strategis BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja		
					Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	%	Inovatif Predikat	Inovatif Predikat		
		Persentase Ketercapaian IKU Kabupaten > 90%	%	100	100	100	100
		Persentase perencanaan OPD Baik	%	100	90	90	100
Rata-Rata Capaian Indikator Tujuan							100
Peringkat Capaian Kinerja							A
	Meningkatnya Efektivitas	Persentasae OPD Dengan Rata-Rata	%	100	100	100	100

	Evaluasi dan Pengendalian	Capaian Kinerja Tinggi					
	Meningkatnya Keselarasan dan sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Prioritas Daerah Dengan Sasaran RPJMD	%	100	100	100	100
		Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	%	100	100	100	100
		Persentase Keselarasan RKPD Dengan RPJMD	%	100	100	100	100
	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Nilai Inovasi Daerah Dengan Kategori Sangat Inovatif	Poin	56	45	60.01	100
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran							100
Peringkat Capaian Kinerja							A

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator tujuan merupakan salah satu komponen Indikator Kinerja Utama pada BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 memiliki peringkat capaian kinerja “sangat tinggi” sebesar 100%. Demikian pula indikator sasaran, dengan capaian kinerja sangat tinggi sebesar 100%.

III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Renstra BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 yang bertujuan untuk “Meningkatnya kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah’, terdapat 3 (tiga) Sasaran Kinerja Bapperida yaitu:

1. Meningkatnya Efektifitas Evaluasi Dan Pengendalian;
2. Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah
3. Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indicator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Realisasi capaian indikator program berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Periode 2021 – 2026:

PROGRAM	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Kinerja Program Prioritas OPD dengan Prioritas Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
	Persentase Keselarasan Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	

	dengan Renstra Bidang Infrastruktur												
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang SP2M	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	

Realisasi capaian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 pada tabel di bawah ini:

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2023**	**Realisasi Tahun 2023**	**Target Tahun 2024**	**Realisasi Tahun 2024**
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Keselarasan Kinerja Program Prioritas OPD dengan Prioritas Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
- Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara
- Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Ekonomi	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang SP2M	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Perekonomian dan SDA	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	**21 %**	**21 %**	**21 %**	**21 %**
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknolog	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyaraka	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP OPD**	**B Predikat**	**B Predikat**	**B Predikat**	**BB Predikat**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaporan	100%	100%	100%	100%
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang / bulan	55 orang / bulan	55 orang / bulan	55 orang / bulan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Notulen Rapat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang penunjang pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%
- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah kondis baik	90%	90%	90%	90%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

Penjelasan masing-masing capaian kinerja dijabar sebagai berikut:

A. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS EVALUASI DAN PENGENDALIAN

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyusun analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang merupakan bagian dari Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, indikator adalah kinerja Dokumen Rancangan Awal RKPD sebanyak satu dokumen. Aktivitas yang dilaksanakan rapat koordinasi tim dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah dalam pemenuhan data yang dibutuhkan sering terlambat.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah terus aktif berkoordinasi dengan produsen data dalam hal ini perangkat daerah dan juga instansi vertikal, baik itu melalui surat menyurat, komunikasi aktif dan bila perlu melakukan kunjungan secara langsung.

2. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Forum konsultasi publik yang dilaksanakan adalah Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Ranwal RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Indikator kinerja yang ditargetkan dan dicapai adalah Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bapperida dan perwakilan peserta yang hadir.

Tidak terdapat kendala/permasalahan dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Permendagri 86 Tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Hasil pembahasan/masukan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan peserta.

   Kegiatan ini dihadiri oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yang terbagi berdasarkan bidang koordinasi pada BAPPERIDA yaitu bidang infrastruktur, bidang perekonomian, serta bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

   Tidak ada kendala/permasalahan dalam pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

4. Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang

Ditetapkan. Target dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) dan pemerintah provinsi untuk fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD kepada gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi NTB, DPRD Kabupaten Lombok Tengah terkait Pokok-Pokok Pikiran dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Kendala/permasalahan yang dihadapi :

1) Tahapan dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan sudah mempunyai jadwal yang jelas dan adanya keterkaitan antara dokumen perencanaan tingkat pusat dan provinsi;
2) Pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri terlambat diterbitkan;
3) Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD tidak tepat waktu;
4) Dalam penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD sangat bergantung pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Solusi mengatasi permasalahan :

1) Menyusun timeline sebagai pedoman dan melakukan koordinasi serta konsultasi secara aktif dengan pemerintah pusat dan provinsi;
2) Dalam penyusunan ranwal menggunakan Peraturan Menteri yang tahun lalu dan dilakukan penyesuaian di dokumen rankhir sebelum penetapan perkada;
3) Berkomunikasi aktif melalui Sekretariat Dewan terkait Pokok-Pokok Pikiran DPRD;

4) Melakukan komunikasi aktif dan intensif dalam rangka penetapan perkada tentang RKPD untuk tetap waktu.

5. Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kinerja dari Sub Kegiatan ini yaitu Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen yang disusun adalah Analisis IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan Analisis Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. IPM dan Kesejahteraan Rakyat merupakan indikator makro dan indikator kinerja daerah, sehingga dokumen hasil analisisnya digunakan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pencapaian target kinerja, ditetapkan Tim Pelaksana/Penyusun yang berasal dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah dengan Keputusan Bupati.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan untuk membiayai Tim Pelaksana dalam menyusun dokumen Analisis IPM dan Analisis Kesejahteraan Rakyat. Juga untuk pelaksanaan workshop/seminar kedua dokumen tersebut.

6. Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Melaksanakan aktivitas pembinaan kepada semua perencana/petugas/operator perangkat daerah yang menangani *e-planning* yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Pembinaan meliputi sosialisasi dan konsultasi dalam penyiapan dan pemanfaatan SIPD. Dilaksanakan juga pengembangan e-monev dalam rangka penyampaian laporan kinerja perangkat daerah dengan sistem kontrak kerja konsultan individu. Pelaksanaan sosialisasi untuk petugas/operator desa/kelurahan dalam pengusulan usulan/aspirasi Masyarakat melalui SIPD.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan, kendala/permasalahan yang dihadapi

antara lain seringnya aplikasi SIPD melakukan migrasi. Dalam tahun 2024 terjadi migrasi dari sipd-kemendagri.go.id menjadi sipd.go.id, sehingga diperlukan migrasi untuk *update* database. Selain itu masih ada di beberapa perangkat daerah yang belum menunjuk ASN nya sebagai koordinator/penanggung jawab/PIC untuk e-planning dan e-monev, yang menyebabkan kurang efektifnya koordinasi.

7. Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota

   Subkegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih ditekankan pada perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Sub kegiatan ini juga membiayai pelaksanaan koordinasi pengendalian pelaksanaan Pembangunan daerah oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 5.b Tahun 2023 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 178 Tahun 2023. Adapun TPPD memiliki tugas antara lain mengumpulkan data, fakta dan informasi atas perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan Pembangunan daerah; melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah berdasarkan pengamatan atas perkembangan situasi dan kondisi; serta memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan.

8. Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

   Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang berupa Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Aktivitas yang dilaksanakan yaitu monitoring pelaksanaan pembangunan daerah, rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah Tahun 2024 dan penyusunan laporan secara berkala baik laporan triwulan untuk pelaksanaan renja perangkat daerah maupun laporan semesteran untuk evaluasi pelaksanaan RKPD. Untuk membantu proses evaluasi dan penyusunan laporan dikembangkan aplikasi e-monev yang dapat digunakan sebagai alat bantu perangkat daerah dalam menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan renja tahun bersangkutan. Aplikasi ini juga dapat menggambarkan capaian proses pelaksanaan renja perangkat daerah, yang sewaktu-waktu dapat dilihat secara langsung oleh Kepala Daerah.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi yaitu :

1) Perangkat Daerah belum sepenuhnya tepat waktu dalam penyampaian laporan melalui e-monev;
2) Masih adanya perbedaan interpretasi/pemahaman terhadap pengisian e-monev, sehingga terlihat capaian dalam laporan yang kurang sesuai;
3) Beberapa indikator kinerja Pembangunan daerah ada yang belum bisa dihitung meskipun sudah berakhir tahun pengganggaran.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain :

1) Berkoordinasi dan berkomunikasi secara aktif dengan semua perangkat daerah untuk menyampaikan laporan tepat waktu;
2) Melakukan pembinaan dan klarifikasi secara langsung dengan perangkat daerah bersangkutan;
3) Membuat tutorial penginputan laporan melalui e-monev;

B. MENINGKATNYA KESELARASAN DAN SINERGI PERENCANAAN DAERAH

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Aktifitas pada sub kegiatan ini berupa koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan ini untuk memastikan terwujudnya keselarasan dan sinergisitas antar dokumen perencanaan. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek atau Rencana Kerja (RENJA) yang disusun oleh Perangkat Daerah dipastikan selaras dengan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Keselarasan tersebut terkait dengan indikator strategis dan program strategis yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan di atas.

Selain itu dalam sub kegiatan ini terdapat aktifitas untuk mendukung kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Bapperida selaku pemangku tugas Kesekretariatan TKPKD Kabupaten Lombok Tengah, berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan, monitoring pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulagan Kemiskinan, bahwa salah satu tugas dan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) adalah menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2024, menyusun dan mengirim Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) secara periodik, yaitu setiap 3 bulan dan laporan akhir kepada Gubernur dan Kemenko PMK.

Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan efektifitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah, dalam sub kegiatan ini mendukung pelaksanaan kegiatan

monitoring dan evaluasi secara periodik yaitu setiap bulan oleh pokja monitoring dan evaluasi TKPKD.

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

   Fokus aktifitas dalam sub kegiatan ini adalah pendampingan dan asistensi bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan perangkat daerah, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, BAPPENDA, dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu.

   Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan seperti rencana kerja yang memiliki kualitas yang baik sesuai dengan isu strategis, arah kebijakan dan kerangka program prioritas yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

   Dalam melakukan asistensi ini, perangkat daerah diarahkan untuk melakukan pemetaan terhadap capaian indikator dari target-target program kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya. Hal ini penting agar dapat dilakukan identifikasi terhadap indikator-indikator yang telah tercapai dan yang belum mencapai target. Dengan demikian nantinya diharapkan akan dapat dilakukan pemetaan mengenai program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Hasil dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersusun dan tersedianya dokumen rencana kerja perangkat daerah lingkup koordinasi bidang perekonomian yang telah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat masih rendahnya kapasitas fiskal Kabupaten Lombok Tengah, dukungan anggaran pembangunan bersumber Dana Transfer (DT) dari pusat sangat dibutuhkan. Upaya-upaya pengusulan program dan kegiatan pembangunan harus diperkuat, terkoordinir dan efektif. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan koordinasi dan asistensi dalam penyusunan pengusulan Program dan Kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024, berupa sosialisasi, verifikasi & validasi usulan, sinkronisasi, harmonisasi hingga penyusunan Rencana Kegiatan (RK). Indikator kinerja sub kegiatan ini dapat dilihat dengan teralokasikannya anggaran DAK Fisik dan Non Fisik tahun 2024 dengan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yaitu sinergisitas antara bidang Pariwisata, yang didukung oleh bidang Industri Kecil dan Menengah, serta bidang Usaha Mikro Kecil.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

   Tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu untuk mengetahui perkembangan indikator pembangunan ekonomi makro yaitu PDRB Tahun 2023, bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan subkegiatan ini berupa pertemuan dan koordinasi dengan BPS untuk mendapatkan informasi/outlook perkembangan perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah yang tergambarkan dalam PDRB Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.

   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan peran aktif perangkat daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini juga digunakan sebagai alat bantu untuk dapat mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.

   Hasil monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui atau mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi

perangkat daerah dalam pelaksanaan program kegiatan. Dengan dilakukannya identifikasi terhadap kendala – kendala tersebut maka akan dapat disusun rencana strategis dalam upaya mengatasi dan mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian diharapkan, target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah akan dapat tercapai secara optimal. Hasil dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu teridentifikasinya hasil pelaksanaan program kegiatan dan kendala yang dihadapi serta rekomendasi untuk percepatan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing perangkat daerah

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

   Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian target-target pembangunan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kontraksi pertumbuhan ekonomi dampak dari pandemi Covid 19 pada tahun 2021 memerlukan upaya fasilitasi melalui program/kegiatan pemulihan ekonomi dan pengembangan ekonomi lokal serta pengembangan Kawasan wisata berbasis masyarakat desa. Fokus utama sub kegiatan ini untuk mendukung perencanaan program kegiatan dalam rangka optimalisasi upaya-upaya pemulihan kepariwisataan daerah.

   Pembangunan kepariwisataan sangat ditentukan dengan kolaborasi para pihak (PENTAHELIX). Sub kegiatan ini memastikan dan mendorong kerjasama Pentahelix melalui fasilitasi pengembangan pariwisata di desa wisata khususnya yang mendapatkan alokasi DAK pariwisata tahun 2023.

5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

   Aktifitas utama dalam sub kegiatan ini adalah asistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan hasil tersusunnya rencana kerja perangkat daerah bidang SDA, serta asistensi

pengusulan program kegiatan dengan sumber DAK Fisik dan Non Fisik bidang Pariwisata.

Penyusunan Renja bidang SDA berupa asistensi kepada dinas pertanian, kelautan dan perikanan dan ketahanan pangan untuk memastikan renja yang disusun selaras dan sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen renja yang disusun juga dipastikan indikatornya spesifik, terukur, dapat dicapai dan agar kepastian waktu pencapaiannya.

Untuk asistensi pengusulan DAK Fisik bidang pariwisata Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dilakukan dengan pendampingan agar OPD memenuhi kebutuhan Readiness Criteria, pendampingan dalam entry melalui aplikasi KRISNA.

6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang SDA

   Aktifitas utama dalam sub kegiatan ini adalah asistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan hasil tersusunnya rencana kerja perangkat daerah bidang sumberdaya alam, serta asistensi pengusulan program kegiatan dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pengelolaan sumberdaya alam. Dalam rangka mencapai hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan koordinasi, asistensi dan verifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi kepada perangkat daerah dalam menyusun usulan DAK Fisik dan pemenuhan readines criteria.

   Perangkat daerah diarahkan untuk dapat mempersiapkan dan menyusun dokumen persyaratan pengusulan (*readiness criteria*) dengan mengacu pada isu-isu strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas dalam bidang SDA. Dengan demikian diharapkan dokumen perencanaan yang disusun akan dapat berkontribusi secara signifikan dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tercapainya target-target pembangunan

daerah di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan ketahanan pangan.

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

   Pada sub kegiatan ini, aktifitas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sektor pengelolaan sumberdaya alam, seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan peran aktif perangkat daerah. Dalam monitoring dan evaluasi ini juga di gunakan instrumen sebagai alat bantu untuk dapat mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.

   Disamping untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui atau mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapai perangkat daerah dalam pelaksanaan program kegiatan. Dengan dilakukannya identifikasi terhadap kendala – kendala tersebut maka akan dapat disusun rencana strategis dalam upaya mengatasi dan mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian diharapkan, indikator target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Rencana Kerja perangkat daerah akan dapat tercapai. Indikator kinerja dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu teridentifikasinya keselarasan dan capaian hasil pelaksanaan program kegiatan berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk percepatan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi selanjutnya akan menjadi salah

satu rekomendasi atau dasar dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah strategis dalam percepatan pelaksanaan program kegiatan.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

   Fokus aktifitas dalam sub kegiatan ini yang pertama adalah asistensi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran (RKP) dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024. Hal ini dilakukan agar perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan DBHCHT sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI. Regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan DBHCHT di daerah diatur dalam PMK 206 Tahun 2020 dan terakhir diubah dengan PMK 215 Tahun 2021 tentag Pemanfaatann dan evaluasi penggunaan DBHCHT.

   Dalam rangka pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sumber dana DBHCHT Tahun 2024, dalam sub kegiatan ini dilaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara periodik. Perangkat daerah pengampu DBHCHT tahun 2024 diwajibkan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala untuk setiap bulan, triwulan, semesteran dan Laporan akhir sesuai format laporan dalam PMK 215 Tahun 2021. Ketaatan pemenuhan kewajiban pelaporan secara berkala ini merupakan syarat salur dana transfer pusat DBHCHT. Sedangkan laporan akhir merupakan salah satu instrument pengukuran kinerja pemanfaatan DBHCHT tahun berjalan sebagai salah satu pertimbangan pagu DBHCHT Tahun berikutnya.

9. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, PJMD dan RKPD)

   Sub kegiatan ini dilakukan dalam rangka membantu mengkoordinasikan terlaksananya kegiatan Perangkat Daerah

urusan Infrastruktur dan Kewilayahan diantaranya koordinasi dan konsolidasi data bidang perhubungan, bidang PUPR dan indikator infrastruktur wilayah.

Aktifitas yang dilakukan dengan pembahasan kegiatan perencanaan usulan PJU (Penerangan Jalan Umum) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu daerah super prioritas yang mendapatkan kesempatan sebagai penerima hibah Lampu Percontohan Alat Penerangan Jalan (APJ) dari Kementerian ESDM.

10. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

    Kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dilakukan untuk membantu mensinergikan dokumen perencanaan pengusulan DAK Irigasi, Sanitasi serta Jalan dan Jembatan. Fokus aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini yakni memastikan kesiapan data persyaratan (dokumen readiness criteria/RC) usulan DAK bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup.

    Kegiatan asistensi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dokumen-dokumen persyaratan (RC) yang diusulkan seperti DED, RAB, Detail Informasi Lokasi Usulan, serta dokumen-dokumen administrasi lainnya sudah tersedia. Sehingga diharapkan usulan-usulan yang diajukan memenuhi syarat dan bisa lanjut pada tahapan selanjutnya.

11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

    Tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini antara lain untuk mengetahui perkembangan bidang infrastruktur Kabupaten LombokTengah. Pelaksanaan monitoring melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur. Ini mencakup pengumpulan data tentang tahapan-

tahapan penyusunan, seperti pengumpulan data, analisis kebutuhan, identifikasi proyek, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Tujuan dari monitoring adalah untuk memastikan bahwa proses penyusunan berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan standar yang ditetapkan. Adapun evaluasi melibatkan penilaian terhadap kualitas dokumen perencanaan infrastruktur yang dihasilkan dan potensi dampaknya. Dengan demikian, melalui pelaksanaan Monev yang sistematis dan terintegrasi, diharapkan dokumen perencanaan infrastruktur yang dihasilkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

Beberapa permasalahan yang kerap kali timbul dalam pelaksanaan monitoring penyusunan dokumen perencanaan antara lain berupa keterlambatan atau ketidaksempurnaan pelaporan dan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan penggunaan dana DAK seringkali kurang sehingga meskipun beberapa kelompok masyarakat telah berinisiatif mengambil peran dalam pemantauan, belum ada pola yang dianggap tepat dan efektif untuk menampung peran serta masyarakat tersebut. Tentunya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penggunaan dana DAK. Ini termasuk memperkuat mekanisme pelaporan dan pengawasan, meningkatkan kapasitas pengawasan di tingkat lokal, dan memperkuat peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana.

12. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah

Aktifitas kegiatan dalam sub kegiatan ini adalah dengan melaksanakan sinergi dan harmonisasi kegiatan Komite Irigasi.

Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota. Bentuk aktifitas yang dilaksakan dengan penguatan kelembagaan dan memastikan partisipasi peningkatan SDM.

Penguatan kelembagaan Komite Irigasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan kinerjanya dalam mengelola sumber daya air irigasi. Hal ini dilakukan dengan cara :

a. Membuat atau memperbarui peraturan dan pedoman yang jelas untuk operasi dan tata kelola Komite Irigasi.
b. Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada anggota Komite Irigasi dalam berbagai aspek manajemen air irigasi, termasuk perencanaan pengelolaan air, teknis operasional infrastruktur irigasi, manajemen keuangan, dan keterampilan komunikasi dan negosiasi.
c. Mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan dan pengambilan keputusan Komite Irigasi.
d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan Komite Irigasi.
e. Membangun kemitraan dan jaringan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan non-pemerintah lainnya yang terkait dengan manajemen sumber daya air.
f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja Komite Irigasi dan implementasi kebijakan dan program-programnya.

Selain penguatan Komite Irigasi, BAPPERIDA juga melaksanakan SIMONI Inpres Air Minum dan Sanitasi. SIMONI Inpres Air Minum dan Sanitasi bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi usulan inpres air minum dan sanitasi.

Inpres air dan sanitasi digalakkan untuk mencapai target SDGs. Instruksi Presiden (Inpres) Percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, memastikan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ada bermanfaat bagi masyarakat dan dikelola dengan baik, serta pemanfaatan idle capacity melalui pembangunan Sambungan Rumah (SR), dan memprioritaskan sasaran pada Kabupaten/Kota yang memiliki akses air minum rendah, memiliki idle capacity, kapasitas fiskal rendah.

Kegiatan sinkronisasi bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan atau tindakan berjalan sejalan dalam waktu yang bersamaan, sementara harmonisasi bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan kesatuan antara berbagai elemen atau komponen yang terlibat dalam pembangunan. Keduanya penting dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.

13. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Aktifitas kegiatan dalam sub kegiatan ini adalah dengan melaksanakan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan, khususnya untuk urusan kawasan permukiman dan kawasan kumuh. Koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan ini untuk mendukung adanya keselarasan dan sinergisitas antar dokumen, yaitu dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2025, serta mendukung indikator capaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026.

Bentuk aktifitas yang dilaksanakan dalam sub kegiatan ini adalah rapat koordinasi dan konsolidasi data-data infrastruktur kewilayahan. Data kewilayahan memiliki urgensi yang sangat besar dalam perencanaan pembangunan daerah karena beberapa alasan utama:

a. Dasar Pengambilan Keputusan: Data kewilayahan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini termasuk informasi tentang kebutuhan permukiman, kondisi eksisting, serta tren dan pola perkembangan yang mungkin mempengaruhi pembangunan di masa depan.
b. Efisiensi Sumber Daya: Dengan data kewilayahan yang baik, sumber daya dapat dialokasikan secara efisien untuk memprioritaskan proyek-proyek pembangunan yang paling penting dan mendesak. Ini membantu menghindari pemborosan sumber daya dan memaksimalkan dampak pembangunan.
c. Perencanaan Jangka Panjang: Data kewilayahan memungkinkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan kondisi infrastruktur, daerah dapat merencanakan investasi jangka panjang yang sesuai dengan perkembangan masa depan.
d. Penyediaan Layanan Publik: Wilayah yang baik adalah jika ruang tersebut mampu memenuhi penyediaan pusat layanan dengan tingkat konektivitas yang tinggi. Data kewilayahan ini membantu dalam memahami di mana layanan-layanan ini diperlukan dan bagaimana mereka dapat dikelola dengan efisien.
e. Daya Saing Ekonomi: Data kewilayahan yang memadai mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Data kewilayahan membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan ruang wilayah yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu.

f. Kesiapsiagaan Bencana: Data kewilayahan ini juga penting untuk perencanaan kesiapsiagaan bencana. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek kewilayahan yang ada, daerah dapat merencanakan respons yang efektif dalam menghadapi bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

Dengan demikian, data kewilayahan tidak hanya penting untuk perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga merupakan aspek yang krusial dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Permasalahan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan di kabupaten Lombok Tengah bisa menjadi tantangan serius yang mempengaruhi efektivitas perencanaan dan implementasi proyek infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan dengan pelaksanaan sub kegiatan ini, banyak hal yang bisa diurai. Diantaranya kurangnya koordinasi antar kegiatan, keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, serta ketidaksesuaian regulasi dan kebijakan.

14. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan perangat daerah bidang kewilayahan, dilakukan kegiatan asistensi terhadap penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Lombok Tengah yang memuat rencana dan program kegiatan tahun 2023-2027 yang akan dilaksanakan untuk megatasi permasalahan terkait dengan urusan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan).

Asistensi penyusunan dokumen SSK Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi terkait ketersediaan data-data yang akan menunjang penyusunan dokumen SSK Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, dilakukan

asistensi dengan OPD urusan sanitasi untuk memastikan kebenaran data eksisting yang akan digunakan dalam dokumen SSK Kabupaten Lombok Tengah.

15. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Pada sub kegiatan ini, aktifitas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sektor pengelolaan infrastruktur ke wilayahan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan peran aktif perangkat daerah. Dalam monitoring dan evaluasi ini juga di gunakan instrumen sebagai alat bantu untuk dapat mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.

Disamping untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui atau mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapai perangkat daerah dalam pelaksanaan program kegiatan. Dengan dilakukannya identifikasi terhadap kendala – kendala tersebut maka akan dapat disusun rencana strategis dalam upaya mengatasi dan mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian diharapkan, indikator target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Rencana Kerja perangkat daerah akan dapat tercapai. Hasil/outcome dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu teridentifikasinya keselarasan dan capaian hasil pelaksanaan program kegiatan berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk percepatan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi selanjutnya akan menjadi salah

satu rekomendasi atau dasar dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah strategis dalam percepatan pelaksanaan program kegiatan.

16. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

    Pada kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, aktifitas yang dilaksanakan fokus pada penajaman kesiapan dokumen perencanaan usulan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Sanitasi, serta rencana pengusulan kegiatan PISEW untuk tahun anggaran 2025.

    Aktifitas yang dilakukan antara lain meliputi rapat koordinasi dengan OPD teknis terkait untuk memastikan keselaraan dan kelengkapan data usulan (Readiness Criteria) yang dipersyaratkan pada saat pengajua usulan DAK. Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024, melakukan perencanaan usulan kegiatan lingkungan hidup dengan menu kegiatan pengadaan Alat Monitoring Kualitas Air secara Online (ONLIMO) dan pengadaan sarana prasarana persampahan.

    Selain itu, aktifitas lainnya yang dilakukan yakni perencanaan usulan kegiatan PISEW untuk tahun anggaran 2025 yang dilakukan melalui aplikasi SIPPa Kementerian PUPR.

17. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

    Aktifitas yang dilaksanakan yaitu rapat koordinasi perencanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang pemerintahan. Pada aktifitas ini dilakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasi capaian standar pelayanan minimal bidang pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan keamanan dan ketertiban umum dan penanganan kebencanaan. Aktifitas ini bertujuan untuk melakukan identifikasi

terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dan merumuskan rencana tindak lanjut dalam rangka optimalisasi pencapaian target standar pelayanan minimal bidang pemerintahan. Pada tahun 2024 capaian standar pelayanan minimal bidang pemerintahan mencapai 100%.

18. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

    Aktifitas yang dilaksanakan yaitu rapat asistensi penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan. Pada tahun 2024, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia melakukan asistensi terkait penyusunan rencana kerja bagi perangkat daerah di bawah koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Asistensi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program kegiatan yang disusun perangkat daerah di dalam rencana kerja dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain, seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah. Dalam hal ini dilakukan diskusi dengan perangkat daerah terkait mengenai indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dan strategi untuk mencapainya. Hal ini untuk memastikan bahwa perangkat daerah memiliki pemahaman yang komprehensif terkait indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan perangkat daerah dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk dapat mencapai atau merealisasikan target-target yang telah ditetapkan tersebut. Salah satu indikatior yang dapat digunakan untuk mengetahui output dari sub kegiatan ini yaitu pencapaian target RPJMD dari perangkat daerah yang berada di bawah koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

    Aktifitas lain yang dilakukan di sub kegiatan ini yaitu rapat asistensi perencanaan percepatan pencapaian standar pelayanan

minimal bidang pemerintahan. Di aktifitas ini Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia melakukan asistensi kepada perangkat daerah terkait untuk melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di urusan pemerintahan. Asistensi dilakukan dalam bentuk koordinasi dan diskusi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi terkait pencapaian standar pelayanan minimal dan menyusun rencana atau langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pencapaian standar pelayanan minimal di sektor pemerintahan. Pada tahun 2024, pencapaian standar pelayanan minimal di urusan pemerintahan mencapai 100%, tapi tentunya penguatan dukungan kebijakan dan anggaran, serta perumusan rancangan program kegiatan yang strategis tetap menjadi hal yang perlu ditingkatkan agar pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan dapat tercapai secara optimal.

19. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan

    Aktifitas yang dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan monitoring dan evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal bidang pemerintahan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melaksanakan diskusi dengan perangkat daerah terkait dan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam melakukan perbaikan terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah. Hal ini diharapkan akan dapat berdampak pada meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

20. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan

Aktifitas yang dilaksanakan berupa rapat koordinasi sinergitas dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Aktifitas ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi perencanaan program kegiatan antara pemerintah desa dengan perangkat daerah terkait. Di dalam aktifitas ini dilakukan diskusi mengenai target-target pembangunan yang akan dicapai oleh desa dan juga perangkat daerah terkait, untuk selanjutnya dilakukan kolaborasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan antara pemerintah desa dengan perangkat daerah terkait, dalam berbagai aspek atau sektor pembangunan seperti di sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, penanganan persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, perlindungan Perempuan dan anak serta pemberdayaan Perempuan, pembinaan kepemudaan dan olahraga, pengembangan perpustakaan serta isu-isu yang berkaitan dengan urusan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia lainnya. Dengan demikian diharapkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan antara pemerintah desa dan perangkat daerah terkait akan dapat meningkat.

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia di sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, juga melakukan aktifitas sosialisasi mengenai perencanaan yang baik dari perspektif hukum, Aktifitas ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah yang menangani persoalan perencanaan terkait aspek-aspek hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Dengan

dipahaminya kaidah-kaidah hukum oleh aparatu perencana, diharapkan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, para perencana di perangkat daerah dapat merujuk pada regulasi yang ada dan dapat mengikuti atau mematuhi prosedur atau mekanisme perencanaan sesuai dengan hukum atau regulasi yang ada.

21. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

    Sub kegiatan ini melaksanakan aktifitas yang fokus pada upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Stunting menjadi salah satu isu nasional dalam bidang kesehatan, oleh karena itu maka bidang pemerintahan dan pembangunan manusia fokus pada upaya pencegahan dan penurunan stuning. Upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti promosi dan sosialisasi mengenai pencegahan dan penurunan stunting, sosialisasi mengenai pendewasaan usia perkawinaan, sosialisasi mengenai pemberian makanan tambahan dan pola asuh, promosi terkait kesehatan ibu dan anak, optimalisasi pemanfataan pekarangan, koordinasi terkait peningkatan kualitas sanitasi dan sejumlah aktifitas lainnya yang bertujuan untuk mencapai target penurunan stunting. Pada sub kegiatan ini dilakukan upaya penguatan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) baik yang berada di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Penguatan TPPS ini perlu dilakukan, mengingat TPPS merupakan lembaga yang berperan dalam menggerakan semua lembaga yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Tengah. Pada sub kegiatan ini upaya-upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting juga terus dilakukan dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait lainnya. Hal ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting baik melalui

intervensi sensitif maupun spesifik dapat dilakukan secara lebih optimal.

Aktifitas lainnya yang dilaksanakan di sub kegiatan ini yaitu koordinasi terkait perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Sebagaimana diketahui bahwa bidang pemerintahan dan pembangunan manusia fokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu maka salah satu sektor strategis yang menjadi fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Berbicara mengenai kedua sektor tersebut maka tentu saja terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu berkaitan mengenai akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan tentu saja tidak akan terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki komptensi yang memadai. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan terus dilakukan secara optimal, melalui berbagai sumber pendanaan, salah satunya adalah yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Untuk dapat mengoptimalkan pemanfataan dana DAK Fisik dan DAK Non Fisik, maka bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terus secara intensif melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam hal penyediaan data mengenai kondisi sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan, serta mendampingi perangkat daerah terkait dalam melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan yang akan diajukan melalui DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dengan demikian diharapkan

pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta sumber daya nya akan dapat dilakukan secara lebih optimal, sehingga layanan pendidikan dan kesehatan dapat berdampak secara lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Tengah.

Aktifitas selanjutnya yang dilaksanakan di sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yaitu rapat koordinasi terkait penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Dalam hal ini bidang pemerintahan dan pembangunan manusia melakukan koordinasi dan diskusi dengan perangkat daerah terkait mengenai rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan. Penentuan terhadap langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan pencapaian target dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan serta pembahasan mengenai kebutuhan anggaran menjadi hal yang dibahas dengan perangkat daerah. Dengan dilakukannya hal ini diharapkan rencana kerja yang disusun perangkat daerah akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) juga menjadi salah satu aktifitas yang dilakukan di sub kegiatan ini. Dalam kaitannya dengan hal ini, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, fokus pada pencapaian indikator indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks kesehatan (usia harapan hidup). Dalam kaitannya dengan hal ini, maka dilakukan identifikasi terhadap program kegiatan yang akan dapat berdampak secara signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Dukungan kebijakan dan anggaran juga terus dilakukan secara optimal dalam rangka mendukung tercapainya indeks pembangunan manusia di sektor kesehatan dan pendidikan. Penguatan pendataan juga menjadi hal yang terus

dilakukan. Pendataan ini dimaksudkan sebagai salah satau referensi atau pedoman dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan lokus intervensi dalam upaya meningkatkan indeks kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil pencapaian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Disamping itu aktifitas yang dilaksanakan di sub kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yaitu pada optimalisasi koordinasi dalam rangka pencapaian target kinerja perangkat daerah yang telah tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia secara intensif melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk memastikan tercapainya target-target pembangunan yang telah tertuang di dalam dokumen RPJMD tahun 2024. Dan berikut adalah data capaian RPJMD Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

22. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Aktifitas difokuskan pada pelaksanaan asistensi penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan asistensi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik bidang pembangunan manusia. Asistensi difokuskan pada langkah-langkah strategis agar perangkat daerah dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan, baik didalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis maupun rencana kerja pemerintah daerah. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia juga secara intensif melakukan pembinaan, agar program kegiatan yang telah direncanakan dapat

dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

23. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

    Aktifitas difokuskan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang fokus pada optimalisasi pelaksanaan DAK Fisik dan Non Fisik, pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah, percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal dan penurunan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi dan stunting. Dalam hal ini bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, disamping melakukan koordinasi dan diskusi dengan perangkat daerah, juga melakukan kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan, seperti misalnya lokasi pembangunan pusat layanan pendidikan seperti rehab bangunan sekolah pada semua tingkat satuan pendidikan, pembangunan ruang laboratorium sekolah, pembangunan ruang kepala sekolah dan pembangunan maupun rehabilitasi serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Monitoring ke lokasi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti pembangunan dan rehab polindes, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan lain-lain. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan dengan meninjau sejumlah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan perangkat daerah seperti pelatihan tenaga kerja, pelayanan dan pengembangan perpustakaan desa dan masjid serta sejumlah kegiatan lainnya. Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan serta pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

24. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Aktifitas yang dilaksanakan fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas layanan perpustakaan, peningkatan produktifitas tenaga kerja. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak serta pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan anak. Aktifitas yang dilakukan antara lain meliputi rapat koordinasi secara intensif dengan melibatkan partisipasti aktif perangkat daerah dan stakeholder terkait lainnya, updating data dan informasi mengenai perkembangan capaian pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah berakitan dengan isu-isu tersebut serta fasilitasi kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang berkaitan dengan bidang pembangunan manusia. Di sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia, juga dilakukan fasilitas bagi organisasi Pita Putih Indonesia Kabupaten Lombok Tengah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

1) Masih belum optimalnya updating data terkait hasil capaian pelaksanaan program kegiatan;
2) Koordinasi dengan perangkat daerah terkait belum berjalan secara optimal;
3) Belum optimalnya implementasi kegiatan inovatif dalam upaya percepatan pencapaian target kegiatan;

Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk dapat mengoptimalkan pelakanaan program kegiatan yaitu :

1) Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka memperoleh data dan informasi terkait hasil pelaksanaan program kegiatan serta melakukan identifikasi terhadap kendala yang dihadapi sebagai salah satu dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk percepatan pencapaian target program kegiatan;
2) Melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait lainnya dalam rangka meningkatkan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan;

Mengidentifikasi dan mengoptimalkan implementasi gagasan-gagasan inovatif dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, dengan melibatkan partisipasi aktif semua pihak.

C. TERWUJUDNYA INOVASI DAERAH YANG BERKUALITAS

1. Sosialiasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan

Tujuan dari sub kegiatan diatas dilaksanakan dalam rangka penumbuh Kembangan inovasi daerah dalam rangka pencapaian nilai Indeks Inovasi Daerah. Dengan indikator jumlah Laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan. Penyelenggaraan Lombok Tengah Innovative Government Award-Sistem Inovasi Daeran (LIGA SINOVA) sebagai ajang lomba inovasi di tingkat kabupaten Lombok Tengah yang diikuti oleh Perangkat Daerah. BAPPERIDA menyiapkan/melakukan pendampingan melalui pengoperasian layanan konsultasi dan asistensi invoasi daerah dengan nama KLINIK SINOVA. Selanjutnya untuk mendisiminasikan/mensosialisasikan hasil-hasil inovasi, BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan

Mandalika Expo yang diikuti oleh Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa, Instansi Vertikal dan UMKM.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan asistensi dan monitoring yang lebih intensif. Selain itu, upaya perbaikan dapat dilakukan dengan membangun ekosistem inovasi melalui penerapan regulasi yang mendukung. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil mencakup penjaringan inovasi secara efektif, melakukan sosialisasi yang lebih intensif, serta menyusun regulasi yang mendukung pengembangan dan implementasi inovasi di daerah. Penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor kunci, di mana pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat meningkatkan kontribusi individu terhadap inovasi. Pentingnya optimalisasi Klinik SINOVA juga tidak boleh diabaikan, karena hal ini dapat menjadi pusat pengembangan dan pertukaran ide yang mempercepat pertumbuhan inovasi. Dengan memadukan semua langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inovasi di daerah.

2. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Pada sub kegiatan ini BAPPERIDA melaksanakan kegiatan Survey Indeks Toleransi dan Kajian Indeks Kepuasan Pelayanan Publik. Survey indeks toleransi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur pencapaian misi pertama Kabupaten Lombok Tengah yaitu merawat akhlaqul dalam bermasyarakat melalui Indeks Toleransi. Adapun tujuan khususnya antara lain, menemukan nilai indeks toleransi di Kabupaten Lombok Tengah, mengidentifikasi faktor berpengaruh terhadap toleransi di Kabupaten Lombok Tengah dan menawarkan model kebijakan penguatan toleransi yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Tengah. Survey indeks toleransi dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan, yang tersebar di 12 (Dua Belas) kecamatan dengan jumlah responden sebanyak 800 orang. Output

dari pelaksanaan survey adalah penyusunan pengukuran indeks toleransi dan sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rangka peningkatan indeks toleransi. Selain itu kegiatan untuk mendukung Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat yaitu Survey indeks kepuasan pelayanan publik di mana setiap penyelenggara layanan publik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat secara berkala, diumumkan kepada public, dan hasil survey kepuasan masyarakat dipergunakan sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara nasional. Adapun tujuan dalam survey tersebut adalah mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah dan menyediakan rekomendasi kebijakan dalam peningkatan kinerja pelayanan publik berkelanjutan. Jumlah responden survei yang dipilih secara purposive sampling dengan metode acak sebanyak 400 responden.

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditangani dalam konteks pelaksanaan survey dan penelitian di daerah. Salah satunya adalah kurangnya pelatihan teknis bagi sumber daya manusia (SDM) pelaksana survey, yang dapat mempengaruhi kualitas dan akurasi data yang dihasilkan. Disamping itu, minimnya penelitian yang bersifat mendalam untuk menjawab isu-isu strategis dan prioritas daerah menjadi hambatan dalam pengembangan kebijakan yang efektif. Selain itu, masih terlihat bahwa hasil survey yang telah dilakukan belum optimal dalam pemanfaatannya sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi dapat diimplementasikan melalui dua langkah strategis :

Pertama, diperlukan peningkatan kualitas pelatihan teknis bagi SDM enumerator dengan melibatkan Badan Pusat Statistik sebagai pembicara. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan

pengetahuan yang lebih mendalam kepada para pelaksana survey, sehingga mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan reliabel.

Kedua, perlu dibuat dokumentasi menyeluruh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Langkah ini akan berperan sebagai bentuk hilirisasi hasil riset kepada pengguna, baik di tingkat perangkat daerah maupun masyarakat umum. Dengan demikian, hasil riset dapat menjadi sumber informasi yang berguna dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif untuk perkembangan daerah.

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran BAPPERIDA Tahun Anggaran 2024

URAIAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		
		(Rp)	(%)
URUSAN PERENCANAAN	11,468,488,215	11,177,490,924	97.46%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,436,292,990	7,249,322,216	97.49%
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157,282,043	124,248,000	79.00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,459,139	19,443,300	99.92%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20,641,840	20,636,000	99.97%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18,335,730	18,333,500	99.99%
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	72,407,442	39,399,200	54.41%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,437,892	26,436,000	99.99%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,167,966,430	6,109,457,643	99.05%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,049,215,850	5,990,719,943	99.03%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16,360,000	16,360,000	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	102,390,580	102,377,700	99.99%

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8,825,600	8,825,600	100.00%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6,352,600	6,352,600	100.00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,473,000	2,473,000	100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17,238,170	17,228,600	99.94%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8,904,460	8,895,000	99.89%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8,333,710	8,333,600	100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	277,070,654	276,900,352	99.94%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,010,789	20,984,500	99.87%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,390,865	17,390,600	100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238,669,000	238,525,252	99.94%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643,629,953	619,416,000	96.24%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	326,544,480	316,760,000	97.00%
Pengadaan Mebel	92,909,042	92,576,000	99.64%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	224,176,431	210,080,000	93.71%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164,280,140	93,246,021	56.76%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164,280,140	93,246,021	56.76%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,834,944,380	1,793,786,812	97.76%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,225,696,480	1,218,617,067	99.42%
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	249,896,552	247,173,430	98.91%
Pelaksanaan Konsultasi Publik	57,551,709	57,494,450	99.90%
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	27,299,980	27,187,100	99.59%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	409,052,546	408,744,418	99.92%
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	34,420,000	34,119,000	99.13%

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	447,475,693	443,898,669	99.20%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	221,288,500	220,877,445	99.81%
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	109,491,000	109,220,000	99.75%
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	111,797,500	111,657,445	99.87%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	387,959,400	354,292,300	91.32%
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kota	347,764,050	314,271,300	90.37%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	40,195,350	40,021,000	99.57%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,197,250,845	2,134,381,896	97.14%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	685,878,406	673,781,856	98.24%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56355540	56,318,880	99.93%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	32,243,512	32,219,200	99.92%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40,025,000	40,023,850	100.00%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	124,029,222	118,213,108	95.31%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	180,089,600	179,768,210	99.82%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32,284,900	32,279,300	99.98%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	46,493,800	46,478,750	99.97%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	174,356,832	168,480,558	96.63%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1,100,005,483	1,062,690,512	96.61%

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	199,999,760	191,596,623	95.80%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30,000,000	28,555,760	95.19%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	34,999,704	34,849,150	99.57%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	364,258,424	358,701,800	98.47%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49,999,760	47,319,929	94.64%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30,000,000	29,999,760	100.00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	34,999,700	34,994,300	99.98%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	355,748,135	336,673,190	94.64%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	411,366,956	397,909,528	96.73%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49,999,670	49,995,000	99.99%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29,999,760	28,213,620	94.05%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	34,999,550	34,984,500	99.96%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	107,288,490	98,858,114	92.14%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49,999,626	47,196,910	94.39%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	29,999,860	29,983,900	99.95%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	44,999,640	44,982,400	99.96%

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	64,080,360	63,695,084	99.40%
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,282,124,580	1,261,957,801	98.43%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,282,124,580	1,261,957,801	98.43%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	561,985,386	560,733,731	99.78%
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	479,627,651	478,495,931	99.76%
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	82,357,735	82,237,800	99.85%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	99,999,895	99,944,900	99.95%
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	99,999,895	99,944,900	99.95%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	620,139,299	601,279,170	96.96%
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	600,139,299	581,286,920	96.86%
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	20,000,000	19,992,250	99.96%
TOTAL KESELURUHAN	12,750,612,795	12,439,448,725	97.56%

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam kategori “sangat tinggi” yaitu sebesar 97,56%.

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024, BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKj-IP SKPD) tahun 2024 sebagai cerminan dari hasil kinerja BAPPERIDA selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2024.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten.

Semoga LKj-IP SKPD ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur BAPPERIDA pada tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASIDAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase ketercapaian IKU Kabupaten > 90%	Persen	Jumlah IKU Kabupaten dengan capaian kinerja > 90% dibagi jumlah total IKU Kabupaten dikali seratus			100	100	100	100	OPD, BPS	Kepala Bapperida
		Persentase perencanaan OPD baik	Persen	Jumlah OPD dengan nilai perencanaan dalam AKIP baik dibagi dengan jumlah seluruh OPD dikali seratus Ket : Baik = nilai perencanaan > 60			90	95	100	100	Inspektorat	Kepala Bapperida
		Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Hasil penilaian Kemendagri Ket : kurang inovatif = IID : 0-34,99; inovatif = IID : 35-60; sangat inovatif = IID : 60,01-100			Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Kemendagri	Kepala Bapperida
2	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PROGRAM PRIORITAS DAERAH	Persentase OPD dengan rata-rata capaian kinerja tinggi	Persen	Jumlah OPD dengan rata-rata capaian kinerja tinggi dibagi jumlah seluruh OPD dikali seratus Ket : Tinggi = > 76%			100	100	100	100	Bapperida	Kepala Bapperida
3	MENINGKATNYA KESELARASAN DAN SINERGI PERENCANAAN DAERAH	Persentase keselarasan Renstra dengan RPJMD	Persen	Jumlah program pada Renstra OPD dibagi jumlah program RPJMD dikali seratus			100	100	100	100	Bapperida	Kepala Bapperida
		Persentase keselarasan Renja dengan RKPD	Persen	Jumlah program dan kegiatan dalam Renja OPD yang sesuai dengan program dan kegiatan dalam RKPD dibagi jumlah seluruh program dan kegiatan dalam RKPD dikali seratus			100	100	100	100	Bapperida	Kepala Bapperida
4	TERWUJUDNYA RISET DAN INOVASI DAERAH YANG BERKUALITAS	Persentase inovasi daerah yang dimanfaatkan dan/atau yang direplikasi	Persen	Jumlah inovasi daerah yang dimanfaatkan dan/atau direplikasi dibagi jumlah inovasi daerah yang dihasilkan/dilaporkan dikali seratus			100	100	100	100	Bapperida	Kepala Bapperida
5	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN URUSAN	Nilai SAKIP PD	Predikat	Hasil penilaian Kemendagri Ket: Sangat Kurang (0-30), Kurang (30-50), Cukup (50-60), Baik (60-70), Sangat Baik (70-80), Memuaskan (80-90), Sangat Memuaskan (90-100)			B	B	B	B	Bapperida	Kepala Bapperida

Praya
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,

LALU WIRANATA, S.IP, MA
NIP. 19761128 200501 1 006

REALISASI CAPAIAN PROGRAM RENSTRA BAPPERIDA PERIODE 2021 - 2026

PROGRAM	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Kinerja Program Prioritas OPD dengan Prioritas Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang SP2M	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	

Kepala BAPPERIDA
Kabupaten Lombok Tengah,

H. LALU WERANATA, S.I.P., M.A.
N.P. 19761128200501 1006

PERJANJIAN KINERJA

(PK – 5 JANUARI 2024)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

(B A P P E R I D A)

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LALU WIRANATA, S.IP, MA**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**
Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP	**LALU WIRANATA, S.IP, MA**
	NIP. 19761128 200501 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah	Persentase Keselarasan Prioritas Daerah Dengan Sasaran RPJMD	100 %
		Persentase keselarasan kinerja program prioritas OPD dengan prioritas daerah	100 %
		Persentase OPD dengan Rata-rata Capaian Kinerja Tinggi	100 %
2	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra dengan RPJMD	100 %
		Persentase Keselarasan Renja dengan RKPD	100 %
3	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Persentase inovasi daerah yang dimanfaatkan dan/atau yang direplikasi	100 %

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	157.282.043,-	Sumber APBD, kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.961.294.649,-	Sumber APBD, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	8.825.600,-	Sumber APBD, kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	17.238.170,-	Sumber APBD, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	288.817.620,-	Sumber APBD, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	597.844.575,-	Sumber APBD, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	164.280.140,-	Sumber APBD, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.225.696.480,-	Sumber APBD, kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	221.288.500,-	Sumber APBD, kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	387.959.400,-	Sumber APBD, kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	689.028.406,-	Sumber APBD, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	850.005.483,-	Sumber APBD, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	411.366.956,-	Sumber APBD, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	433.399.433,-	Sumber APBD, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	99.999.895,-	Sumber APBD, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	532.323.632,-	Sumber APBD, kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP

Pihak Pertama,

LALU WIRANATA, S.IP, MA
NIP. 19761128 200501 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. IRMAN, MM**
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **LALU WIRANATA, S.IP, MA**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
LALU WIRANATA, S.IP, MA	**Ir. H. IRMAN, MM**
NIP. 19761128 200501 1 006	NIP. 19671231 199303 1 132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	157.282.043,-	Sumber APBD, kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.961.294.649,-	Sumber APBD, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	8.825.600,-	Sumber APBD, kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	17.238.170,-	Sumber APBD, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	288.817.620,-	Sumber APBD, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	597.844.575,-	Sumber APBD, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	164.280.140,-	Sumber APBD, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

LALU WIRANATA, S.IP, MA
NIP. 19761128 200501 1 006

Pihak Pertama,

Ir. H. IRMAN, MM
NIP. 19671231 199303 1 132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERNIE ISIS SURYANI, SH**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Ir. H. IRMAN, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ir. H. IRMAN, MM	**ERNIE ISIS SURYANI, SH**
NIP. 19671231 199303 1 132	NIP. 19760727 200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen
		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen
		Laporan Adminsitrasi BMD	2 Dokumen
		Laporan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
		Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Dokumen
		Barang Milik Daerah yang diadakan	2 Jenis
		Barang Milik Daerah Kondisi Baik	2 Jenis

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	157.282.043,-	Sumber APBD, kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.961.294.649,-	Sumber APBD, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	8.825.600,-	Sumber APBD, kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	17.238.170,-	Sumber APBD, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	288.817.620,-	Sumber APBD, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	597.844.575,-	Sumber APBD, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	164.280.140,-	Sumber APBD, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

Ir. H. IRMAN, MM
NIP. 19671231 199303 1 132

Pihak Pertama,

ERNIE ISIS SURYANI, SH
NIP. 19760727 200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DALILAH, SP, M.Env.M**

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **LALU WIRANATA, S.IP, MA**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
LALU WIRANATA, S.IP, MA	**DALILAH, SP, M.Env.M**
NIP. 19761128 200501 1 006	NIP. 19730116 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD	100 %
		Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	100 %
		Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Ekonomi dan SDA	100 %
		Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	850.005.483,-	Sumber APBD, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	411.366.956,-	Sumber APBD, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

LALU WIRANATA, S.IP, MA
NIP. 19761128 200501 1 006

Pihak Pertama,

DALILAH, SP, M.Env.M
NIP. 19730116 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI MULIANA WIDIASTUTI, S.Sos, M.PA**

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **LALU WIRANATA, S.IP, MA**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
LALU WIRANATA, S.IP, MA	**SRI MULIANA WIDIASTUTI, S.Sos, M.PA**
NIP. 19761128 200501 1 006	NIP. 19750307 199403 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang P2M dengan RKPD	100 %
		Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang P2M	100 %

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	689.028.406,-	Sumber APBD, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

LALU WIRANATA, S.IP, MA
NIP. 19761128 200501 1 006

Pihak Pertama,

SRI MULIANA WIDIASTUTI, S.Sos, M.PA
NIP. 19750307 199403 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURUL HUSNAWATI, ST, M.Ak**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **LALU WIRANATA, S.IP, MA**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
LALU WIRANATA, S.IP, MA	**NURUL HUSNAWATI, ST, M.Ak**
NIP. 19761128 200501 1 006	NIP. 19740521 199902 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100 %
		Persentase Kesesuaian Program pada Renstra dengan RPJMD	100 %
		Persentase Rekomendasi Hasil Monev yang di Tindaklanjuti	100 %

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.225.696.480,-	Sumber APBD, kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	221.288.500,-	Sumber APBD, kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	387.959.400,-	Sumber APBD, kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

LALU WIRANATA, S.IP, MA
NIP. 19761128 200501 1 006

Pihak Pertama,

NURUL HUSNAWATI, ST, M.Ak
NIP. 19740521 199902 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AJIE NASRULFIDDIN PUA NOTE, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **LALU WIRANATA, S.IP, MA**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
LALU WIRANATA, S.IP, MA	**AJIE NASRULFIDDIN PUA NOTE, S.Sos, MM**
NIP. 19761128 200501 1 006	NIP. 19771001 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target
1	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	23 %

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	433.399.433,-	Sumber APBD, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	99.999.895,-	Sumber APBD, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	532.323.632,-	Sumber APBD, kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Praya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

LALU WIRANATA, S.IP, MA
NIP. 19761128 200501 1 006

Pihak Pertama,

AJIE NASRULFIDDIN PUA NOTE, S.Sos, MM
NIP. 19771001 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASIDAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. A. AZIS, SH., MH.**
Jabatan : Pjs Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 27 September 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama**,
H. A. AZIS, SH., MH.	**H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah	Persentase OPD Dengan Rata-Rata Capaian Kinerja Tinggi	100%
2.	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	100%
		Persentase Keselarasan Renja Dengan RKPD	100%
3.	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Persentase Inovasi Daerah Yang Dimanfaatkan dan/atau yang direplikasi	100%

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.834.944.380	DAU
2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.200.400.845	DAU
3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.282.124.580	DAU
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.436.292.990	DAU

Praya, 27 September 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama**,
H. A. AZIS, SH., MH.	**H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASIDAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. LALU WIRANATA, S.IP, MA**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 27 September 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama**,
LALU WIRANATA, S.IP, MA	**Drs. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.282.043	APBD (DAU)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.167.966.430	APBD (DAU)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.825.600	APBD (DAU)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.238.170	APBD (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.070.654	APBD (DAU)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	643.629.953	APBD (DAU)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.280.140	APBD (DAU)

Praya, 27 September 2024

Pihak Kedua,

LALU WIRANATA, S.IP, MA

Pihak Pertama,

Drs. H. AHMAD SAMSURIADI, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASIDAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**JOHAN ZAMRONI BAROKAH, S.T.**
Jabatan	:	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama	:	**H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**
Jabatan	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 27 September 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama**,
H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.	**JOHAN ZAMRONI BAROKAH, S.T.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Program Prioritas Daerah	Persentase Keselarasan Prioritas Daerah Dengan Sasaran RPJMD	100%
		Persentase keselarasan kinerja program prioritas OPD dengan prioritas daerah	100%
		Persentase OPD dengan Rata-rata Capaian Kinerja Tinggi	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.225.696.480	APBD (DAU)
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	221.288.500	APBD (DAU)
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	387.959.400	APBD (DAU)

Praya, 27 September 2024

Pihak Kedua,

H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

Pihak Pertama,

JOHAN ZAMRONI BAROKAH, S.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASIDAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**SRI MULIANA WIDIASTUTI, S.Sos., M.P.A.**
Jabatan	:	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama	:	**H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**
Jabatan	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 27 September 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama**,
H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.	**SRI MULIANA WIDIASTUTI, S.Sos., M.P.A.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	100%
		Persentase Keselarasan Renja Dengan RKPD	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	689.028.406	APBD (DAU)

Praya, 27 September 2024

Pihak Kedua,

H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.

Pihak Pertama,

SRI MULIANA WIDIASTUTI, S.Sos., M.P.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASIDAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**DALILAH, S.P., M.Env.M.**
Jabatan	:	Kepala Bidang Perekonomian, Sda, Infrastruktur Dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama	:	**H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**
Jabatan	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 27 September 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama**,
H. LALU WIRANATA, S.IP, MA.	**DALILAH, S.P., M.Env.M.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dan Sinergi Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renstra Dengan RPJMD	100%
		Persentase Keselarasan Renja Dengan RKPD	100%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.100.005.483	APBD (DAU)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	411.366.956	APBD (DAU, DBHCHT)

Praya, 27 September 2024

Pihak Kedua,

H. LALU MIRANATA, S.IP, MA.

Pihak Pertama,

DALILAH, S.P., M.Env.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASIDAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**AJIE NASRULFIDDIN PUA NOTE,S.SOS.,MM.**
Jabatan	:	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama	:	**H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.**
Jabatan	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 29 September 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama**,
H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.	**AJIE NASRULFIDDIN PUA NOTE,S.SOS.,MM.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Inovasi Daerah Yang Berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	23%

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	561.985.386	APBD (DAU)
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	620.139.299	APBD (DAU)

Praya, 29 September 2023

Pihak Kedua,

H. LALU WIRANATA, S.IP., MA.

Pihak Pertama,

AJIE NASRULFIDDIN PUA NOTE,S.SOS.,MM.

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Raden Puguh Puyung Komplek Kantor Bupati Gedung C Lantai 3, Lombok Tengah, NTB
email: bapperida@lomboktengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (LKjIP-SKPD) DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LkjIP SKPD) di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKjIP SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Lombok Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tentang Pengundangan tanggal 14 Agustus 1958 Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (LKjIP-SKPD) DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025**

KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKjIP SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKjIP SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKjIP SKPD) Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 6 Januari 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunaan,
Riset dan Inovasi Daerah,

H. LALU WIRANATA, SIP.MA
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 197611282005011006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 9 Tahun 2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTASI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (LKJiP SKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Sekretaris
4	Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
5	Bq. Ningsih, SH.	Anggota
6	Prade Septo Nugroho, ST.	Anggota

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 6 Januari 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunaan, Riset dan Inovasi Daerah,

H. LALU WIRANATA, SIP.MA
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 197611282005011006

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tahun Pelaksanaan 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluas 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (2025) (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										1		2		3		4													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program Prioritas Daerah																										
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100 %	5,935,312,328		0	100 %	Rp.1,834,944,380	0 %	Rp.695,608,444	%	Rp.380,868,350	%	Rp.376,055,496	%	Rp.369,192,317	%	Rp.1,821,724,607	100 %			Rp. 99	100 %	0	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
			Persentase Kesesuaian Program pada Renstra dengan RPJMD	100 %				100 %		0 %		%	Rp.380,868,350	%	Rp.376,055,496	%		%		100 %				100 %			
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Hasil Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Program Prioritas	2 Dokumen	Rp.4,234,433,136		Rp.0	2 Dokumen	Rp.1,225,696,480	0 Dokumen	Rp.670,815,214	1 Dokumen	Rp.333,745,390	1 Dokumen	Rp.288,672,996	0 Dokumen	Rp.188,727,317	2 Dokumen	Rp.1,481,960,917	100 %	121 %	4	Rp.1,481,960,917	200			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Rp.885,302,830			3 Dokumen	Rp.221,288,500	0 Dokumen	Rp.13,200,000	1 Dokumen	Rp.9,900,000	1 Dokumen	Rp.62,417,000	1 Dokumen	Rp.29,000,000	3 Dokumen	Rp.114,517,000	100 %	52 %	6	Rp.114,517,000	200			
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembnagunan Daerah	3 Dokumen	Rp.815,576,362			3 Dokumen	Rp.387,959,400	0 Dokumen	Rp.11,593,230	2 Dokumen	Rp.37,222,960	0 Dokumen	Rp.24,965,500	1 Dokumen	Rp.151,465,000	3 Dokumen	Rp.225,246,690	100 %	58 %	6	Rp.225,246,690	200			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				100%	99%						
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya Keselarasan dan Sinergi Perencanaan Daerah																										
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD	100 %	7,778,828,640			100 %	Rp.1,950,400,845	%	Rp.225,907,271	%	Rp.188,046,779	%	Rp.690,955,304	%	Rp.819,935,142	%	Rp.1,924,844,496	100 %			Rp. 99	100 %	0		
			Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	100 %				100 %		%		%	Rp.188,046,779	%	Rp.690,955,304	%		%		100 %				100 %			
			Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang P2M dengan RKPD	100 %				100 %		%		%	Rp.188,046,779	%	Rp.690,955,304	%		%		100 %				100 %			
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Ekonomi dan SDA	100 %				100 %		%		%	Rp.188,046,779	%	Rp.690,955,304	%		%		100 %				100 %			
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %				100 %		%		%	Rp.188,046,779	%	Rp.690,955,304	%		%		100 %				100 %			
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang P2M	100 %				100 %		%		%	Rp.188,046,779	%	Rp.690,955,304	%		%		100 %				100 %			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	Rp.2,592,942,880			8 Dokumen	Rp.689,028,406	0 Dokumen	Rp.114,933,288	2 Dokumen	Rp.98,159,548	4 Dokumen	Rp.276,921,340	2 Dokumen	Rp.150,766,880	8 Dokumen	Rp.640,781,056	100 %	93 %	16	Rp.640,781,056	200			

		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Perekonomian dan SDA	8 Dokumen				8 Dokumen	Rp.850,005,483	0 Dokumen	Rp.86,998,323	2 Dokumen	Rp.50,650,629	4 Dokumen	Rp.293,623,795	2 Dokumen	Rp.544,090,165	8 Dokumen	Rp.975,362,912	100 %	115 %	16	Rp.975,362,912	200			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen				8 Dokumen	Rp.411,366,956	0 Dokumen	Rp.23,975,660	2 Dokumen	Rp.39,236,602	4 Dokumen	Rp.120,410,169	2 Dokumen	Rp.125,078,097	8 Dokumen	Rp.308,700,528	100 %	75 %	16	Rp.308,700,528	200			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				100%	99%						
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	25,945,503,748			B Predikat	Rp.7,195,582,797	0 Predikat	Rp.4,007,691,859	Predikat	Rp.2,069,143,860	Predikat	Rp.351,989,170	Predikat	Rp.1,366,131,892	Predikat	Rp.7,794,956,781	BB Predikat			Rp. 99	BB Predikat	0		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen	Rp.2,254,323,365			22 Dokumen	Rp.157,282,043	4 Dokumen	Rp.19,776,000	10 Dokumen	Rp.18,524,900	6 Dokumen	Rp.48,865,900	2 Dokumen	Rp.14,770,200	22 Dokumen	Rp.101,937,000	100 %	65 %	44	Rp.101,937,000	200			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen	Rp.21,999,956,286			31 Dokumen	Rp.6,665,256,627	6 Dokumen	Rp.3,591,341,362	10 Dokumen	Rp.1,683,033,588	10 Dokumen	Rp.35,931,500	5 Dokumen	Rp.1,191,011,900	31 Dokumen	Rp.6,501,318,350	100 %	98 %	62	Rp.6,501,318,350	200			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Adminsitrasi BMD	2 Dokumen	Rp.14,000,000			2 Dokumen	Rp.8,825,600	0 Dokumen	Rp.0	0 Dokumen	Rp.0	1 Dokumen	Rp.5,598,600	1 Dokumen	Rp.2,777,000	2 Dokumen	Rp.8,375,600	100 %	95 %	4	Rp.8,375,600	200			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen				2 Dokumen	Rp.17,238,170	1 Dokumen	Rp.225,000	0 Dokumen	Rp.3,425,000	0 Dokumen	Rp.7,784,600	1 Dokumen	Rp.2,400,000	2 Dokumen	Rp.13,834,600	100 %	80 %	4	Rp.13,834,600	200			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Dokumen	Rp.651,224,097			12 Dokumen	Rp.288,817,620	0 Dokumen	Rp.58,946,425	8 Dokumen	Rp.30,737,180	2 Dokumen	Rp.47,864,190	2 Dokumen	Rp.67,106,015	12 Dokumen	Rp.204,653,810	100 %	71 %	24	Rp.204,653,810	200			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang diadakan	2 jenis	Rp.826,500,000			2 jenis	Rp.597,844,575	1 jenis	Rp.316,760,000	1 jenis	Rp.324,460,000	0 jenis	Rp.184,607,000	0 jenis	Rp.71,498,000	2 jenis	Rp.897,325,000	100 %	150 %	4	Rp.897,325,000	200			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Kondisi Baik	2 jenis	Rp.185,500,000			2 jenis	Rp.164,280,140	0 jenis	Rp.20,643,072	2 jenis	Rp.8,963,192	0 jenis	Rp.21,337,380	0 jenis	Rp.16,568,777	2 jenis	Rp.67,512,421	100 %	41 %	4	Rp.67,512,421	200			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				100%	99%						
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Terwujudnya Inovasi Daerah yang Berkualitas																										
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	378,097,180			100 %	Rp.1,065,722,795	%	Rp.106,734,860	%	Rp.144,923,840	%	Rp.262,441,908	%	Rp.383,822,233	%	Rp.897,922,841	100 %			Rp. 84	100 %	0		
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	23 %		22 %		23 %		%		%	Rp.144,923,840	%	Rp.262,441,908	%		%		23 %				23 %			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Hasil Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan	2 Dokumen	Rp.228,097,180			2 Dokumen	Rp.433,399,268	1 Dokumen	Rp.13,065,000	0 Dokumen	Rp.82,155,740	0 Dokumen	Rp.100,256,258	1 Dokumen	Rp.369,110,233	2 Dokumen	Rp.564,587,231	100 %	130 %	4	Rp.564,587,231	200			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	Rp.50,000,000			1 Dokumen	Rp.99,999,895	0 Dokumen	Rp.0	1 Dokumen	Rp.0	0 Dokumen	Rp.83,196,000	0 Dokumen	Rp.4,532,000	1 Dokumen	Rp.87,728,000	100 %	88 %	2	Rp.87,728,000	200			
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	Rp.100,000,000			1 Dokumen	Rp.532,323,632	0 Dokumen	Rp.93,669,860	0 Dokumen	Rp.62,768,100	0 Dokumen	Rp.78,989,650	1 Dokumen	Rp.10,180,000	1 Dokumen	Rp.245,607,610	100 %	46 %	2	Rp.245,607,610	200			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				100%	84%						
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH KEGIATAN (%)																				100 %	98 %						
PREDIKAT KINERJA																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :																											

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tahun Pelaksanaan 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluas 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (2025) (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										1		2		3		4													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program Prioritas Daerah																										
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100 %	5,935,312,328		0		Rp.1,834,944,380	0 %	Rp.695,608,444		0		0	0	0	0 %	Rp.695,608,444			0	Rp. 6,630,920,772	0	111.72	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
			Persentase Kesesuaian Program pada Renstra dengan RPJMD	100 %								0		0													
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Hasil Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Program Prioritas	2 Dokumen	Rp.4,234,433,136		Rp.0	2 Dokumen	Rp.1,225,696,480	0	Rp.670,815,214	0	0	0	0	0	0	0Dokumen	Rp.670,815,214	0 %	55 %	2	Rp.670,815,214	100 Dokumen			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Rp.885,302,830			3 Dokumen	Rp.221,288,500	0	Rp.13,200,000		0		0	0	0	0Dokumen	Rp.13,200,000	0 %	6 %	3	Rp.13,200,000	100 Dokumen			
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembnagunan Daerah	3 Dokumen	Rp.815,576,362				Rp.387,959,400	0	Rp.11,593,230	0	0	0	0		0	0Dokumen	Rp.11,593,230	0 %	3 %	3	Rp.11,593,230	100 Dokumen			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				0%	38%						
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya Keselarasan dan Sinergi Perencanaan Daerah																										
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD	100 %	7,778,828,640				Rp.1,950,400,845	%	Rp.225,907,271		0		0		0	%	Rp.225,907,271				Rp. 8,004,735,911		102.9		
			Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	100 %								0		0													
			Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang P2M dengan RKPD	100 %								0		0													
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Ekonomi dan SDA	100 %								0		0													
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %								0		0													
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang P2M	100 %								0		0													
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	Rp.2,592,942,880			8 Dokumen	Rp.689,028,406	0	Rp.114,933,288		0	0	0	0	0	0Dokumen	Rp.114,933,288	0 %	17 %	8	Rp.114,933,288	100 Dokumen			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Perekonomian dan SDA	8 Dokumen					Rp.850,005,483	0	Rp.86,998,323		0		0		0	0Dokumen	Rp.86,998,323	0 %	10 %	8	Rp.86,998,323	100 Dokumen			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen					Rp.411,366,956	0	Rp.23,975,660		0		0		0	0Dokumen	Rp.23,975,660	0 %	6 %	8	Rp.23,975,660	100 Dokumen			

Rata-rata Capaian kinerja (%)																			0%	12%							
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	25,945,503,748				Rp.7,195,582,797	0 Predikat	Rp.4,007,691,859		0		0	0	0	0 Predikat	Rp.4,007,691,859			0	Rp. 29,953,195,607	0	115.45		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen	Rp.2,254,323,365			22 Dokumen	Rp.157,282,043	4	Rp.19,776,000	0	0	0	0	0	4Dokumen	Rp.19,776,000	18 %	13 %	26	Rp.19,776,000	118 Dokumen			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen	Rp.21,999,956,286			31 Dokumen	Rp.5,961,294,649	6	Rp.3,591,341,362	0	0	0	0	0	6Dokumen	Rp.3,591,341,362	19 %	60 %	37	Rp.3,591,341,362	119 Dokumen			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Adminsitrasi BMD	2 Dokumen	Rp.14,000,000			2 Dokumen	Rp.8,825,600	0	Rp.0	0	0	0	0	0	0Dokumen	Rp.0	0 %		2	Rp.0	100 Dokumen			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen					Rp.17,238,170	1	Rp.225,000		0	0	0	0	1Dokumen	Rp.225,000	50 %	1 %	3	Rp.225,000	150 Dokumen			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Dokumen	Rp.651,224,097			12 Dokumen	Rp.288,817,620	0	Rp.58,946,425	0	0	0	0	0	0Dokumen	Rp.58,946,425	0 %	20 %	12	Rp.58,946,425	100 Dokumen			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang diadakan	2 jenis	Rp.826,500,000			2 jenis	Rp.597,844,575	1	Rp.316,760,000	0	0	0	0	0	1jenis	Rp.316,760,000	50 %	53 %	3	Rp.316,760,000	150 jenis			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Kondisi Baik	2 jenis	Rp.185,500,000				Rp.164,280,140	0	Rp.20,643,072	0	0		0		0jenis	Rp.20,643,072	0 %	13 %	2	Rp.20,643,072	100 jenis			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																			20%	56%							
Predikat Kinerja																			Tinggi	Sangat Tinggi							
	Terwujudnya Inovasi Daerah yang Berkualitas																										
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	378,097,180				Rp.1,065,722,795	%	Rp.106,734,860		0		0	0	0	%	Rp.106,734,860				Rp. 484,832,040		128.23		
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	23 %		22 %		23 %					0		0	0										
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Hasil Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan	2 Dokumen	Rp.228,097,180				Rp.433,399,268	1	Rp.13,065,000	0	0		0	0	0	1Dokumen	Rp.13,065,000	50 %	3 %	3	Rp.13,065,000	150 Dokumen			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	Rp.50,000,000			1 Dokumen	Rp.99,999,895	0	Rp.0	0	0		0	0	0	0Dokumen	Rp.0	0 %		1	Rp.0	100 Dokumen			
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	Rp.100,000,000				Rp.532,323,632	0	Rp.93,669,860	0	0		0	0	0	0Dokumen	Rp.93,669,860	0 %	18 %	1	Rp.93,669,860	100 Dokumen			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																			17%	10%							
Predikat Kinerja																			Sedang	Sangat Rendah							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH KEGIATAN (%)																			9 %	29 %							
PREDIKAT KINERJA																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tahun Pelaksanaan 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluas 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (2025) (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										1		2		3		4													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program Prioritas Daerah																										
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100 %	5,935,312,328		0		Rp.1,834,944,380	0 %	Rp.695,608,444		0		0	0	0	%	Rp.1,076,476,794				Rp. 6,630,920,772		111.72	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
			Persentase Kesesuaian Program pada Renstra dengan RPJMD	100 %									0		0												
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Hasil Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Program Prioritas	2 Dokumen	Rp.4,234,433,136		Rp.0	2 Dokumen	Rp.1,225,696,480	0	Rp.670,815,214	1	Rp.333,745,390	0	0	0	0	1Dokumen	Rp.1,341,630,428	1 %	82 %	3	Rp.1,341,630,428	150			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Rp.885,302,830			3 Dokumen	Rp.221,288,500	0	Rp.13,200,000		Rp.9,900,000		0	0	0	1Dokumen	Rp.26,400,000	1 %	10 %	4	Rp.26,400,000	133			
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembnagunan Daerah	3 Dokumen	Rp.815,576,362				Rp.387,959,400	0	Rp.11,593,230	2	Rp.37,222,960	0	0		0	2Dokumen	Rp.23,186,460	1 %	13 %	5	Rp.23,186,460	167			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				50%	59%						
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya Keselarasan dan Sinergi Perencanaan Daerah																										
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD	100 %	7,778,828,640				Rp.1,950,400,845	%	Rp.225,907,271		0		0		0	%	Rp.413,954,050				Rp. 8,004,735,911		102.9		
			Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	100 %									0		0												
			Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang P2M dengan RKPD	100 %									0		0												
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Ekonomi dan SDA	100 %									0		0												
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %									0		0												
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang P2M	100 %									0		0												
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	Rp.2,592,942,880			8 Dokumen	Rp.689,028,406	0	Rp.114,933,288		Rp.98,159,548	0	0	0	0	2Dokumen	Rp.229,866,576	1 %	31 %	10	Rp.229,866,576	125			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Perekonomian dan SDA	8 Dokumen					Rp.850,005,483	0	Rp.86,998,323		Rp.50,650,629		0		0	2Dokumen	Rp.173,996,646	1 %	16 %	10	Rp.173,996,646	125			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen					Rp.411,366,956	0	Rp.23,975,660		Rp.39,236,602		0		0	2Dokumen	Rp.47,951,320	1 %	15 %	10	Rp.47,951,320	125			

Rata-rata Capaian kinerja (%)																		25%	21%						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	25,945,503,748				Rp.7,195,582,797	0 Predikat	Rp.4,007,691,859		0		0	0	0	Predikat	Rp.6,076,835,719				Rp. 29,953,195,607		115.45		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen	Rp.2,254,323,365			22 Dokumen	Rp.157,282,043	4	Rp.19,776,000	10	Rp.18,524,900	0	0	0	14Dokumen	Rp.39,552,000	1 %	24 %	36	Rp.39,552,000	164			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen	Rp.21,999,956,286			31 Dokumen	Rp.5,961,294,649	6	Rp.3,591,341,362		Rp.1,683,033,588	0	0	0	16Dokumen	Rp.7,182,682,724	1 %	88 %	47	Rp.7,182,682,724	152			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Adminsitrasi BMD	2 Dokumen	Rp.14,000,000			2 Dokumen	Rp.8,825,600	0	Rp.0	0	Rp.0	0	0	0	0Dokumen	Rp.0	1 %		2	Rp.0	100			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen					Rp.17,238,170	1	Rp.225,000		Rp.3,425,000	0	0	0	1Dokumen	Rp.450,000	1 %	21 %	3	Rp.450,000	150			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Dokumen	Rp.651,224,097			12 Dokumen	Rp.288,817,620	0	Rp.58,946,425	8	Rp.30,737,180	0	0	0	8Dokumen	Rp.117,892,850	1 %	31 %	20	Rp.117,892,850	167			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang diadakan	2 jenis	Rp.826,500,000			2 jenis	Rp.597,844,575	1	Rp.316,760,000	1	Rp.324,460,000	0	0	0	2jenis	Rp.633,520,000	1 %	107 %	4	Rp.633,520,000	200			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Kondisi Baik	2 jenis	Rp.185,500,000				Rp.164,280,140	0	Rp.20,643,072	2	Rp.8,963,192		0	0	2jenis	Rp.41,286,144	1 %	18 %	4	Rp.41,286,144	200			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																		62%	84%						
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Terwujudnya Inovasi Daerah yang Berkualitas																								
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	378,097,180				Rp.1,065,722,795	%	Rp.106,734,860		0		0	0	0	%	Rp.251,658,700				Rp. 484,832,040		128.23		
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	23 %		22 %		23 %					0		0	0										
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Hasil Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan	2 Dokumen	Rp.228,097,180				Rp.433,399,268	1	Rp.13,065,000	0	Rp.82,155,740		0	0	0	1Dokumen	Rp.26,130,000	1 %	22 %	3	Rp.26,130,000	150			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	Rp.50,000,000			1 Dokumen	Rp.99,999,895	0	Rp.0	1	Rp.0		0	0	0	1Dokumen	Rp.0	1 %		2	Rp.0	200			
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	Rp.100,000,000				Rp.532,323,632	0	Rp.93,669,860	0	Rp.62,768,100		0	0	0	0Dokumen	Rp.187,339,720	1 %	29 %	1	Rp.187,339,720	100			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																		50%	24%						
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH KEGIATAN (%)																		47 %	47 %						
PREDIKAT KINERJA																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tahun Pelaksanaan 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluas 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (2025) (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										1		2		3		4											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program Prioritas Daerah																										
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100 %	5,935,312,328		0	100 %	Rp.1,834,944,380	0 %	Rp.695,608,444	%	Rp.380,868,350	%	Rp.376,055,496	0	0	%	Rp.1,076,476,794	%			Rp. 6,630,920,772	%	111.72	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
			Persentase Kesesuaian Program pada Renstra dengan RPJMD	100 %				100 %		0 %		%	Rp.380,868,350	%	Rp.376,055,496			%		%				%			
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Hasil Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Program Prioritas	2 Dokumen	Rp.4,234,433,136		Rp.0	2 Dokumen	Rp.1,225,696,480	0 Dokumen	Rp.670,815,214	1 Dokumen	Rp.333,745,390	1 Dokumen	Rp.288,672,996			2 Dokumen	Rp.1,293,233,600	100 %	106 %	4	Rp.1,293,233,600	200			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Rp.885,302,830			3 Dokumen	Rp.221,288,500	0 Dokumen	Rp.13,200,000	1 Dokumen	Rp.9,900,000	1 Dokumen	Rp.62,417,000			2 Dokumen	Rp.85,517,000	67 %	39 %	5	Rp.85,517,000	167			
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembnagunan Daerah	3 Dokumen	Rp.815,576,362			3 Dokumen	Rp.387,959,400	0 Dokumen	Rp.11,593,230	2 Dokumen	Rp.37,222,960	0 Dokumen	Rp.24,965,500			2 Dokumen	Rp.73,781,690	67 %	19 %	5	Rp.73,781,690	167			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				78%	79%						
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya Keselarasan dan Sinergi Perencanaan Daerah																										
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD	100 %	7,778,828,640			100 %	Rp.1,950,400,845	%	Rp.225,907,271	%	Rp.188,046,779	%	Rp.690,955,304		0	%	Rp.413,954,050	%			Rp. 8,004,735,911	%	102.9		
			Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	100 %				100 %		%		%	Rp.188,046,779	%	Rp.690,955,304			%		%				%			
			Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang P2M dengan RKPD	100 %				100 %		%		%	Rp.188,046,779	%	Rp.690,955,304			%		%				%			
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Ekonomi dan SDA	100 %				100 %		%		%	Rp.188,046,779	%	Rp.690,955,304			%		%				%			
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %				100 %		%		%	Rp.188,046,779	%	Rp.690,955,304			%		%				%			
			Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD Bidang P2M	100 %				100 %		%		%	Rp.188,046,779	%	Rp.690,955,304			%		%				%			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	Rp.2,592,942,880			8 Dokumen	Rp.689,028,406	0 Dokumen	Rp.114,933,288	2 Dokumen	Rp.98,159,548	4 Dokumen	Rp.276,921,340			6 Dokumen	Rp.490,014,176	75 %	71 %	14	Rp.490,014,176	175			

		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Perekonomian dan SDA	8 Dokumen				8 Dokumen	Rp.850,005,483	0 Dokumen	Rp.86,998,323	2 Dokumen	Rp.50,650,629	4 Dokumen	Rp.293,623,795			6 Dokumen	Rp.431,272,747	75 %	51 %	14	Rp.431,272,747	175			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen				8 Dokumen	Rp.411,366,956	0 Dokumen	Rp.23,975,660	2 Dokumen	Rp.39,236,602	4 Dokumen	Rp.120,410,169			6 Dokumen	Rp.183,622,431	75 %	45 %	14	Rp.183,622,431	175			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				75%	57%					
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	25,945,503,748			B Predikat	Rp.7,195,582,797	0 Predikat	Rp.4,007,691,859	Predikat	Rp.2,069,143,860	Predikat	Rp.351,989,170	0	0	Predikat	Rp.6,076,835,719	Predikat			Rp. 29,953,195,607	Predikat	115.45		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen	Rp.2,254,323,365			22 Dokumen	Rp.157,282,043	4 Dokumen	Rp.19,776,000	10 Dokumen	Rp.18,524,900	6 Dokumen	Rp.48,865,900			20 Dokumen	Rp.87,166,800	91 %	55 %	42	Rp.87,166,800	191			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen	Rp.21,999,956,286			31 Dokumen	Rp.5,961,294,649	6 Dokumen	Rp.3,591,341,362	10 Dokumen	Rp.1,683,033,588	10 Dokumen	Rp.35,931,500			26 Dokumen	Rp.5,310,306,450	84 %	89 %	57	Rp.5,310,306,450	184			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Adminsitrasi BMD	2 Dokumen	Rp.14,000,000			2 Dokumen	Rp.8,825,600	0 Dokumen	Rp.0	0 Dokumen	Rp.0	1 Dokumen	Rp.5,598,600			1 Dokumen	Rp.5,598,600	50 %	63 %	3	Rp.5,598,600	150			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen				2 Dokumen	Rp.17,238,170	1 Dokumen	Rp.225,000	0 Dokumen	Rp.3,425,000	0 Dokumen	Rp.7,784,600			1 Dokumen	Rp.11,434,600	50 %	66 %	3	Rp.11,434,600	150			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Dokumen	Rp.651,224,097			12 Dokumen	Rp.288,817,620	0 Dokumen	Rp.58,946,425	8 Dokumen	Rp.30,737,180	2 Dokumen	Rp.47,864,190			10 Dokumen	Rp.137,547,795	83 %	48 %	22	Rp.137,547,795	183			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang diadakan	2 jenis	Rp.826,500,000			2 jenis	Rp.597,844,575	1 jenis	Rp.316,760,000	1 jenis	Rp.324,460,000	0 jenis	Rp.184,607,000			2 jenis	Rp.825,827,000	100 %	138 %	4	Rp.825,827,000	200			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Kondisi Baik	2 jenis	Rp.185,500,000			2 jenis	Rp.164,280,140	0 jenis	Rp.20,643,072	2 jenis	Rp.8,963,192	0 jenis	Rp.21,337,380			2 jenis	Rp.50,943,644	100 %	31 %	4	Rp.50,943,644	200			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				80%	89%					
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	Terwujudnya Inovasi Daerah yang Berkualitas																									
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	378,097,180			100 %	Rp.1,065,722,795	%	Rp.106,734,860	%	Rp.144,923,840	%	Rp.262,441,908	0	0	%	Rp.251,658,700	%			Rp. 484,832,040	%	128.23		
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	23 %		22 %		23 %		%		%	Rp.144,923,840	%	Rp.262,441,908	0		%		%				%			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Hasil Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan	2 Dokumen	Rp.228,097,180			2 Dokumen	Rp.433,399,268	1 Dokumen	Rp.13,065,000	0 Dokumen	Rp.82,155,740	0 Dokumen	Rp.100,256,258			1 Dokumen	Rp.195,476,998	50 %	45 %	3	Rp.195,476,998	150			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	Rp.50,000,000			1 Dokumen	Rp.99,999,895	0 Dokumen	Rp.0	1 Dokumen	Rp.0	0 Dokumen	Rp.83,196,000			1 Dokumen	Rp.83,196,000	100 %	83 %	2	Rp.83,196,000	200			
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	Rp.100,000,000			1 Dokumen	Rp.532,323,632	0 Dokumen	Rp.93,669,860	0 Dokumen	Rp.62,768,100	0 Dokumen	Rp.78,989,650			0 Dokumen	Rp.235,427,610	0 %	44 %	1	Rp.235,427,610	100			
Rata-rata Capaian kinerja (%)																				50%	48%					
Predikat Kinerja																				Sedang	Sangat Tinggi					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH KEGIATAN (%)																				71 %	68 %					
PREDIKAT KINERJA																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :